

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda;

- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak da Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
- 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

- sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- 17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- 18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- 20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
- 21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- 22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- 24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- 25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
- 26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
- 27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- 28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- 29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

- 30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- 31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- 32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
- 33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- 34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- 38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocaliafuchliap haga, collocaliamaxina, collocalia esculanta, dan collocalialinchi.
- 40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- 42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

- penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 52. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 53. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- 54. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 55. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 56. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 57. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 58. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
- 59. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 60. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
- 61. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas jasa penyediaan tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat Pelelangan.
- 62. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 63. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 64. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas jasapelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 65. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- 66. Retribusi Pelayanan Jasa Barang adalah pembayaran atas pelayanan jasa barang yang merupakan fasilitas dilingkungan pelabuhan berupa kegiatan penyimpanan atau penumpukan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka (lapangan penumpukan) yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 67. Retribusi Pelayanan jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 68. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 69. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- 70. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yangberfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 71. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 72. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
- 73. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 74. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 75. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
- 76. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Pajak

Paragraf 1 Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;

- 4. jasa parkir; dan
- 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT:
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah Pusat.

Pasal 5

(1) Setiap orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendapatan Daerah.

(2) Dalam hal orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak, NJOP Tidak Kena Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. NJOP dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - b. NJOP dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen); dan
 - c. NJOP dengan nilai lebih dari Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 3 Saat Pajak Terutang dan Wilayah Pemungutan

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris:
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;

- d. hakpakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 3 Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli
- (3) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupatipaling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat PBJT

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen:
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - 1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

(1) Subjek PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

(2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

- (1) Tarif PBJT atas Makanan dan Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 6% (enam persen)
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu, pagelaran kesenian, musik, tari dan /atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. diskotik, kelab malam dan bar ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - c. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - d. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen).

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 3 Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 32

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan:
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat dilakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;

- h. Reklame film/ slide; dan
- i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Paragraf 3 Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 38

- (1) Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 39

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peratuan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 3 Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar,
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - 1. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;

- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Paragraf 3 Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 50

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 51

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitupengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayal (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3 Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan Opsen PKB

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 57

Objek Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB yaitu instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 59

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 61

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf 3 Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 62

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB yaitu instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan Tarif

Pasal 64

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 65

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Paragraf 3 Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 67

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 68

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 69

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Pasal 70

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
 - f. pelayanan jasa Kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung;dan
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
- (9) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.

BAB IV RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. Puskesmas pembantu;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - e. tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD; dan
 - d. pihak swasta.

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati Pelayanan Kesehatan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pemungut dan pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dikecualikan dari Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. masyarakat yang menjadi sasaran dan memenuhi ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. anak Sekolah di Daerah yang berkunjung ke Puskesmas pada jam belajar dengan menunjukan buku berobat dari sekolah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat pengukuran penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah/pengelolaan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 77

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan yaituorang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kebersihan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis Sampah/limbah kakus/limbah cair.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 79

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 80

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan pelayanan tempat parkir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pembagian hasil retribusi pihak pemerintah daerah 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% sedangkan Pihak Ke Tiga 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Untuk pembagian hasil retribusi persentasi ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat Parkir.

Paragraf 2 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 84

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan atau menggunakan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau Badan yang menikmati Pelayanan atau menggunakan fasilitas Pasar, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasartermasuk pemugut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 87

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Pasar merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas atau klasifikasi tempat, fasilitas di pasar, jenis pedagang dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 88

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 89

(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu penyediaan fasilitas untuk kegiatan usaha berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas kegiatan usaha berupa pasar grosir dan/atau pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan/atau Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas kegiatan usaha berupa pasar grosir dan/atau pertokoan dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 92

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 93

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu penyediaan Tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan PelelanganIkan, Ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan diTempat Pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 95

(1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan diukur berdasarkan luas Tempat Pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 96

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yaitu penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalanyaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yaitu orang pribadi atau Badan yang yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

(1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 100

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, termasuk pemugut atau pemotong Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 104

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 105

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan Ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitupelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan Ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 107

(1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan Ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 108

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 109

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yaitu pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 111

(1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 112

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 113

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 114

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga termasuk pemugut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 115

(1) Tingkat penggunaan jasa atas jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 116

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 117

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 118

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 120

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pemakaian Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi:
 - a. pemakaian panggung dan alat musik;
 - b. rumah dinas Pemerintah Daerah, gedung dan stadion/lapangan;
 - c. pemakaian/pemanfaatan tanah;
 - d. penyediaan jasa laboratorium;
 - e. penyediaan jasa alat berat; dan
 - f. fasilitasi komunikasi dan informatika.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
 - b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- (1) Subjek Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemungut dan pemotong Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 123

(1) Tingkat penggunaan pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan jumlah

- penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian panggung dan alat musik, rumah dinas Pemerintah Daerah, gedung dan stadion/lapangan, pemakaian/pemanfaatan tanah, penyediaan jasa laboratorium, penyediaan jasa alat berat dan fasilitasi komunikasi dan informatika diukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, berdasarkan jenis pemanfaatan, volume dan jangka waktu serta jenis fasilitas pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian peralatan alat uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 124

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Retribusi PBG

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

- (1) Objek Retribusi PBG yaitu penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat layak fungsi Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan

- c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

- (1) Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukanpembayaran Retribusi PBG.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (4) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau

- b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume:
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 128

- (1) Besarnya Retribusi PBG dihitung berdasarkan penetapan:
 - a. lingkup item komponen retribusi ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;
 - b. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan Bangunan Gedung baru, rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan
 - c. volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung, dan untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

 $PBG = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

Indeks terintegrasi (It) dihitung dengan rumus: If $x \sum (bp \times Ip) \times Fm$.

(4) Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

PBG Prasarana BG = V x I x Ibg x HSpbg

(5) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Retribusi Penggunaan

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 129

- (1) Objek Retribusi RPTKA yaitu pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 130

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 131

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asingdiukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 132

- (1) Besaran tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asingditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penetapansurat pemberitahuan pembayaranDana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Perpanjangan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 133

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 134

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 135

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 136

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian dari biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum,penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Biaya penyelenggaraan pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB VIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian,tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha danRetribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 138

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, Surat Setoran Pajak Daerah, dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPD Kurang Bayar, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(8) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 140

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanyaunsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.

- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huruhara, dan/atau kerusuhan.
- (5) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (6) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (7) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (8) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya
- (9) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (10) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (11) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (12) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (13) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (14) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal (21 dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. Gangguan teknis lainnya yang dinyatakan melalui keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 144

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANSKI ADMINISTRATIF

Pasal 145

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar 2% (dua persen) dari besaran Pajak terutang untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non Alam;
 - c. Bencana Sosial;
 - d. Kebakaran dan/atau;
 - e. Gangguan teknis lainnya yang dinyatakan melalui keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian wajib pajak.
- (6) Wajib pajak Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan membuktikan keadaan kahar yang dialaminya.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 150

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Ketentuan Pasal 183 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 151

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Pasal 150, dan Pasal 151 merupakan pendapatan negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 153

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kecuali mengenai ketentuan perubahan besaran dan struktur tarifnya, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 157

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri C Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri C Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Lalu Lintas Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 21);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 7);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 8);
- 1. Peraturan DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 10);
- n. Peraturan DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 16);
- o. Peraturan DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 14);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 15)
- r. Peraturan DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 16);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 17);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 12);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 19);
- v. Peraturan DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor20) sebagaimana telah diuabah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 15);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 4);
- y. Peraturan DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 7);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 4);

- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 8);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 9);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 5);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 2);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 4); dan
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 6),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 159

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 4 Januari 2024

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/84/11/2023.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH ARNHAMAN SNA IAM PASER UTARA Wasan Bagian Hukum,

> Artono, S.H.,M.H. 19730117 200604 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Penaham Paser Utara harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Pajak Daerah yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB,Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Opsen PKB danOpsen BBNKB dan mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentatg Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Penaham Paser Utara untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Penaham Paser Utara, serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Penaham Paser Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan sematamata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- 1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
- 2. NJOP Rp X juta Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
- 3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimmana dihitung berdasarkan:

- (1) Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambahkan dengan biaya Kwh/Variabel yang ditagihkan kedalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
- (2) Jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
 (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Atas Barang Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)).

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61

Contoh Perhitungan Besaran pokok Opsen PKB:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta
- b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

- 2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
 - b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 62 Cukup jelas.

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jenis pedagang" adalah pedagang tetap dan pedagan musiman.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus Parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat Parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Pasal 107 Cukup jelas.

Pasal 108 Cukup jelas.

Pasal 109 Cukup jelas.

Pasal 110 Cukup jelas.

Pasal 111 Cukup jelas.

Pasal 112 Cukup jelas.

Pasal 113 Cukup jelas.

Pasal 114 Cukup jelas.

Pasal 115 Cukup jelas.

Pasal 116 Cukup jelas.

Pasal 117 Cukup jelas.

Pasal 118 Cukup jelas.

Pasal 119 Cukup jelas.

Pasal 120 Cukup jelas.

Pasal 121 Cukup jelas.

Pasal 122 Cukup jelas.

Pasal 123 Cukup jelas.

Pasal 124 Cukup jelas.

```
Pasal 125
     Cukup jelas.
Pasal 126
     Cukup jelas.
Pasal 127
     Cukup jelas.
Pasal 128
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung
           PBG = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg
              Keterangan:
              LLt : Luas Total Lantai
                    : Indeks Lokalitas
              SHST: Standar Harga Satuan Tertinggi
              It : Indeks Terintegrasi
                     : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
              Ibg
           Indeks terintegrasi (It) dihitung dengan rumus: If x \sum (bp \times Ip) \times Fm
              Keterangan:
              If : indeks fungsi
                    : bobot parameter
              bp
                   : indeks parameter
              Fm: faktor kepemilikan
     Ayat (4)
            Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
            PBG Prasarana BG = V \times I \times Ibg \times HSpbg
              Keterangan:
              V : Volume
                     : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
                     : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
              HSpbg: Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
      Ayat (5)
            Contoh perhitungan Retribusi PBG serta Sarana dan Prasarana:
            A. Kasus hunian perumahan baru tipe 36
              Data Bangunan:
              Fungsi
                                     : Hunian
              Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup>
              Ketinggian
                                     : 1 lantai
              Kepemilikan
                                     : pribadi
```

Prasarana : Pagar 38 m

SHSTBGN Sederhana : Rp5.620.000,00

Indeks Lokalitas : 0,35%

Fungsi	Indeks Fungsi	bpxII)	Klasifikasi dan Parameter		Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3x1 0,20 x 2,00 0,50 x 1,00 ∑(bpxIp)		Kompleksitas Permanensi Ketinggian Kepemilikan	:	sederhana Permanen Ilantai perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (İt): $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$

Prasarana Bangunan Gedung:

Jenis Prasarana = Pagar

Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) = 1 (Bangunan Baru)

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) = 1 (Bangunan Baru)

Harga Satuan Retribusi = Rp1000/m

Cara perhitungan nilai

1. Retribusi PBG Bangunan

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x Retribusi PBGSHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

: 36 x (0,35% x Rp5.620.000,00) x 0,18 x 1

: Rp127.461,00

2. Retribusi PBG Prasarana Bangunan

: Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks BG Terbangun (Ibg) x Hspbg

:38 x 1 x 1 x 1000

: Rp38.000,00

Nilai Retribusi = Retribusi PBG Bangunan + Retribusi Prasarana

Bangunan

= Rp127.461,00 + Rp38.000,00

= Rp165.461,00

B. Kasus gedung restoran baru

Data Bangunan

Fungsi : Usaha Luas Bangunan (Llt) : 500 m2 Ketinggian

: 3 lantai

Kepemilikan

: pribadi

SHST BGN Sederhana: Rp5.620.000,00

Indeks Lokalitas

: 0,25 %.

Fungsi	Indeks Fungsi	1 ()()X(()		Klasifikasi dan Parameter
Usaha (non UMKM)	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,12 ∑(bpxIp)	= 0,6 = 0,40 = 0,56 1,56	Kompleksitas: tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0.7 \times 1.56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 500 x (0,25% x Rp5.620.000,00) x 1,092 x 1

: Rp7.671.300,00

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing" adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Pasal 134 Cukup jelas.

Pasal 135 Cukup jelas.

Pasal 134 Cukup jelas.

Pasal 135 Cukup jelas.

Pasal 136 Cukup jelas.

Pasal 137 Cukup jelas.

Pasal 138 Cukup jelas.

Pasal 139 Ayat (1) Cukup jelas.

> Ayat (2) Cukup jelas.

> Ayat (3) Cukup jelas.

> Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Surat Setoran Pajak Daerah" adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar" adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Yang dimaksud dengan "Surat Keputusan Keberatan" adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 140 Cukup jelas.

Pasal 141 Cukup jelas.

Pasal 142 Cukup jelas.

Pasal 143 Cukup jelas.

Pasal 144 Cukup jelas.

Pasal 145 Cukup jelas.

Pasal 146 Cukup jelas.

Pasal 147 Cukup jelas.

Pasal 148 Cukup jelas.

Pasal 149 Cukup jelas.

Pasal 150 Cukup jelas.

Pasal 151 Cukup jelas.

Pasal 152 Cukup jelas.

Pasal 153 Cukup jelas.

Pasal 154 Cukup jelas. Pasal 155 Cukup jelas.

Pasal 156 Cukup jelas.

Pasal 157 Cukup jelas.

Pasal 158 Cukup jelas.

Pasal 159 Cukup jelas.

Pasal 160 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 43.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 **TENTANG** PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Pengobatan Umum

		Kompoi	Komponen Jasa		
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)	
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Baru Rawat Jalan/Lansia/ Dewasa/Bayi	5.600,00	22.400,00	28.000,00	
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Lama Rawat Jalan/Lansia/ Dewasa/Bayi	5.600,00	22.400,00	28.000,00	
3	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan di Pustu,Poskesdes dan jejaring Puskesmas lainnya	4.000,00	16.000,00	20.000,00	
4	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis	15.000,00	60.000,00	75.000,00	
5	Konsultasi Ahli (Psikolog)	15.000,00	60.000,00	75.000,00	
6	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	10.000,00	40.000,00	50.000,00	
7	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna) + Surat Keterangan	7.000,00	28.000,00	35.000,00	
8	Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum dan tujuan Bekerja /TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang) + Surat Keterangan	7.000,00	28.000,00	35.000,00	
9	Pelayanan Fisioterapi:				
	a. Kecil	8.000,00	32.000,00	40.000,00	
	b. Sedang	14.000,00	56.000,00	70.000,00	
	c. Besar	20.000,00	80.000,00	100.000,0	
10	Konseling Kesling (Sanitarian)	4.000,00	16.000,00	20.000,0	
11	Konsultasi/KonselingGizi	4.000,00	16.000,00	20.000,0	
12	Pelayanan Akupresur	10.000,00	40.000,00	50.000,0	

Keterangan: rincian pelayanan fisioterapi meliputi:

- a. Tindakan Kecil:
 - 1. UV (Ultraviolet);
 - IRR(Infra red radiation);
 Icing; dan

 - 4. Exercise sederhana;
- b. Tindakan Sedang:
 - Pelayanan/tindakan dengan dua(2) modalitas fisioterapi sederhana;
 Taping/Straping;

 - 3. Edukasi, sensory retraing; dan
 - 4. Latihan Artikulasi,suara,irama,latihan bahasa pada afasia;
- c. Tindakan Besar:
 - 1. Paket senam;
 - 2. Pelayanan/tindakan lebih dari dua(2) modalitas fisioterapi sederhana;
 - 3. Pelayanan/tindakan degan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat,seperti :SWD (Short wave diaterhermil), MWD (Microwave Diathermi), Traksi Cervico-Lumbal, Nebulizer, Interferential Current, SWT (Shockwave Therapy), S.S.P (Stainlesteel spike point), ERAW;
 - 4. Exesvise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium; dan
 - 5. Oral motor exercise, aoudio visual, deteksi dini.

2. Pelayanan Kesehatan Di Unit Gawat Darurat

		Kompon	ien Jasa	
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	13.500,00	31.500,00	45.000,00
2	Pelayanan Observasi < 6 Jam	10.500,00	24.500,00	35.000,00

3. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

		Kompor	Komponen Jasa		
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)	
1	Pemeriksaan gigi pasien lama	10.500	24.500	35.000	
2	Pemeriksaan gigi pasien baru	12.000	28.000	40.000	
3	Pembersihan Karang gigi	45.000	105.000	150.000	
4	Tumpatan GIC 1 permukaan	30.000	70.000	100.000	
5	Tumpatan GIC 2 permukaan	45.000	105.000	150.000	
6	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	60.000	120.000	180.000	
7	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 permukaan)	45.000	105.000	150.000	
8	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	60.000	120.000	180.000	
9	Tumpatan Komposit Light Cured (Besar/lebih dari 2 permukaan)	75.000	175.000	250.000	
10	Perawatan Pulp Capping	12.000	28.000	40.000	
11	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	12.000	28.000	40.000	
12	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)	13.500	31.500	45.000	
13	Perawatan Syaraf C (Pengisian Kamar Pulpa)	12.000	28.000	40.000	
14	Trepanasi gigi	10.500	24.500	35.000	
15	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	9.000	21.000	30.000	
16	Koreksi Okulasi / Ulcus Decubitus	12.000	28.000	40.000	
17	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anastesi	12.000	28.000	40.000	
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject	21.000	49.000	70.000	
19	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposible	30.000	70.000	100.000	
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposible dengan penyulit	45.000	105.000	150.000	
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	36.000	84.000	120.000	
22	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit	45.000	105.000	150.000	
23	Incisi Abses / Regio / Perawatan Dry Socket	15.000	35.000	50.000	
24	Operkulektomi	30.000	70.000	100.000	
25	Operasi Gigi	90.000	210.000	300.000	
26	Heacting Oral	15.000	35.000	50.000	
27	Kontrol Post Exo/Op (Heacting Up)	9.000	21.000	30.000	
28	Alveolectomy / Regio	30.000	70.000	100.000	
29	Reposisi Mandibula	21.000	49.000	70.000	
30	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	45.000	105.000	150.000	

4. Pelayanan KIA Dan KB

		Kompo	nen Jasa	
No.	Ionia Palayanan	Jasa	Jasa Sarana	Tarif
NO.	Jenis Pelayanan	Pelayanan	(Rp)	(Rp)
		(Rp)		
1	Pemeriksaaan kehamilan (Ante Natal Care)	9.000	21.000	30.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu:			
	a. Kesehatan pranikah (konseling)	7.500	17.500	25.000
	b. Pelayanan Ibu Nifas	7.500	17.500	25.000
	c. Fiksasi PAP Smear	45.000	105.000	150.000
	d. Senam Nifas	6.000	14.000	20.000
	e. Senam Ibu Hamil	6.000	14.000	20.000
	f. Pijat Oksitosin	6.000	14.000	20.000
	g. Yoga Masa kehamilan	6.000	14.000	20.000
	h. Pemeriksaan IVA (Inspection	15.000	35.000	50.000
	VisualAsamasetat test)			30.000
3	Pijat Bayi	15.000	35.000	50.000
4	Pelayanan KB			
	a. Konsultasi Reproduksi	6.000	14.000	20.000
	b. Suntik KB	9.000	21.000	30.000
	c. Pelayanan KB pil	4.500	10.500	15.000
	d. Pelayanan KB Kondom	4.500	10.500	15.000
	e. Pemasangan Susuk / Implant	30.000	70.000	100.000
	f. Pencabutan Susuk / Implant	45.000	105.000	150.000
	g. Pemasangan IUD	30.000	70.000	100.000
	h. Pencabutan IUD	30.000	70.000	100.000
	i. Kontrol IUD	10.500	24.500	35.000
	j. Tindik Telinga	6.000	14.000	20.000
	k. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	6.000	14.000	20.000

Keterangan : Untuk Tindakan Pemasangan Implant/Iud Tidak Termasuk Bahan

5. Pelayanan Tindakan Medik

		Kompor	Komponen Jasa		
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)	
1	Rawat Luka				
	a. Rawat Luka Ringan	7.500	17.500	25.000	
	b. Rawat Luka Besar	16.500	38.500	55.000	
	c. Rawat luka combutio <30%	21.000	49.000	70.000	
	d. Rawat Luka ganggren kecil	12.000	28.000	40.000	
	e. Rawat Luka ganggren besar	24.000	56.000	80.000	
2	Hecting (jahit luka)				
	a. Hecting 1-5 simpul	12.000	28.000	40.000	
	b. Hecting > 5 simpul (per simpul)	3.000	7.000	10.000	
	c. Angkat jahitan	6.000	14.000	20.000	
3	Sirkumsisi	150.000	350.000	500.000	
4	Ekstraksi kuku	18.000	42.000	60.000	
5	Ekstraksi clavus	30.000	70.000	100.000	
6	Ekstraksi corpus alienum non operatif	6.000	14.000	20.000	
7	Ekstraksi corpus alienum mata	18.000	42.000	60.000	
8	Ekstraksi corpus alienum telinga	9.000	21.000	30.000	
9	Extraksi corpus alienum operatif/insisi	15.000	35.000	50.000	
10	Extirpasi Lipoma	60.000	120.000	180.000	
11	Ekstraksi serumen	9.000	21.000	30.000	
12	Incisi abses Kecil	9.000	21.000	30.000	
13	Incisi abses Besar	15.000	35.000	50.000	
14	Eksisi atheroma	60.000	120.000	180.000	

		Kompor	nen Jasa	
No.	Jenis Pelayanan	Jasa	Jasa Sarana	Tarif
		Pelayanan	(Rp)	(Rp)
1.5		(Rp)	110.000	150.000
15	Injeksi keloid	51.000	119.000	170.000
16	Pasang Kateter	15.000	35.000	50.000
17	Lepas Kateter	6.000	14.000	20.000
18	Pasang infus	9.000	21.000	30.000
19	Lepas Infus	3.000	7.000	10.000
20	Pasang spalk (Tidak termasuk Bahan)	3.000	7.000	10.000
21	Spooling	6.000	14.000	20.000
22	Tampon epistaxis ringan	7.500	17.500	25.000
23	Tampon epistaxis sedang	10.500	24.500	35.000
24	Refraksi mata	15.000	35.000	50.000
25	Memasukkan Obat lewat Dubur	10.500	24.500	35.000
26	Visum et repertum	45.000	105.000	150.000
27	Cross insisi	9.000	21.000	30.000
28	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (≤5 Lpm)	10.500	24.500	35.000
29	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama	21.000	49.000	70.000
	(>5 Lpm)			
30	Pemakaian tambahan Oksigen per jam (<5 Lpm)	3.000	7.000	10.000
31	Pemakaian tambahan Oksigen per jam (>5 Lpm)	12.000	28.000	40.000
32	Nebulasi per pemakaian	21.000	49.000	70.000
33	Penanganan Kejang	21.000	49.000	70.000
34	Pemberian nutrisi via NGT/OGT	3.000	7.000	10.000
35	Ekstrasi Benda asing pada THT per tindakan	15.000	35.000	50.000
36	Pemasangan NGT/OGT per tindakan	21.000	49.000	70.000
37	Injeksi (IV, IM, SC)	6.000	14.000	20.000
38	Vaksinasi ABU @Vial	279.000	651.000	930.000
39	Vaksin Rabies @ vial	99.000	231.000	330.000
40	Vaksin HPV (per paket)	750.000	1.750.000	2.500.000
41	Vaksin Meningitis	114.000	266.000	380.000

6. Pelayanan Rawat Inap Dan Persalinan

Pelayanan Rawat Inap

		Kompor		
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
1	Akomodasi Rawat Inap/hari rawat	24.000	56.000	80.000
2	Visite Dokter Umum setiap Hari	4.500	10.500	15.000
3	Asuhan Keperawatan pasien umum/hari	3.000	7.000	10.000
4	Pelayanan Rekam Medis dan administrasi Rawat Inap (sekali selama di rawat)	4.500	10.500	15.000
5	Makan pasien/hari	15.000	35.000	50.000

7. Pelayanan Persalinan Dan Poned

No.		Kompor	nen Jasa	Tarif
	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	(Rp)
1	Persalinan Normal (fisiologis)	210.000	490.000	700.000
2	Manual Plasenta	45.000	105.000	150.000
3	Resusitasi untuk bayi asfiksia	45.000	105.000	150.000

No.		Kompor	nen Jasa	Tarif
	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	(Rp)
4	Pelaksanaan thermal control	9.000	21.000	30.000
5	Perawatan bayi normal	13.500	31.500	45.000
6	Pemeriksaan VT	7.500	17.500	25.000
7	Persalinan dengan Penyulit	285.000	665.000	950.000
8	Cuci Plasenta	22.500	52.500	75.000

8. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Dan Elektromedik

		Kompor	nen Jasa	
No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
		(Rp)		
1	Pemeriksaan USG	30.000	70.000	100.000
2	Pemeriksaan EKG	15.000	35.000	50.000
3	Pemeriksaan Dopler	6.000	14.000	20.000

9. Pelayanan Laboratorium

		Kompon	Komponen Jasa		
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)	
Α	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI				
1	Pemeriksaan Darah Lengkap	21.000	49.000	70.000	
2	Pemeriksaan Hb	6.000	14.000	20.000	
3	Pemeriksaan Leukosit	3.000	7.000	10.000	
4	Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff)	3.000	7.000	10.000	
5	Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah)	7.500	17.500	25.000	
6	Pemeriksaan Erytrosit	3.000	7.000	10.000	
7	Pemeriksaan Trombosit	3.000	7.000	10.000	
8	Pemeriksaan Widal	16.500	38.500	55.000	
9	Pemeriksaan PCV	6.000	14.000	20.000	
10	Pemeriksaan Billirubin Darah	7.500	17.500	25.000	
11	Pemeriksaan Urobilin Darah	7.500	17.500	25.000	
12	Pemeriksaan Golongan Darah	6.000	14.000	20.000	
13	Pemeriksaan Rhesus	3.000	7.000	10.000	
В	PEMERIKSAAN URINALISA				
1	Pemeriksaan Urine Lengkap	7.500	17.500	25.000	
2	Pemeriksaan Reduksi	3.000	7.000	10.000	
3	Pemeriksaan Albumin	3.000	7.000	10.000	
4	Pemeriksaan Urobulin Urine	3.000	7.000	10.000	
5	Pemeriksaan BilirubinUrine	3.000	7.000	10.000	
6	Pemeriksaan Sedimen	4.500	10.500	15.000	
7	Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik)	4.500	10.500	15.000	
8	Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter	36.000	84.000	120.000	
9	Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter	6.000	14.000	20.000	
С	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK				
1	Pemeriksaan Cholesterol	9.000	21.000	30.000	
2	PemeriksaanTrigliserida	9.000	21.000	30.000	
3	Pemeriksaan LDL	6.000	14.000	20.000	
4	Pemeriksaan HDL	7.500	17.500	25.000	
5	Pemeriksaan Asam Urat	7.500	17.500	25.000	

		Kompon	Komponen Jasa		
No.	Jenis Pelayanan	Jasa	Jasa Sarana	Tarif	
NO.	Jenis Felayanan	Pelayanan	(Rp)	(Rp)	
		(Rp)			
6	Pemeriksaan Gula Darah	7.500	17.500	25.000	
7	Pemeriksaan BUN	9.000	21.000	30.000	
8	Pemeriksaan Creatinin	9.000	21.000	30.000	
9	Pemeriksaan SGOT	7.500	17.500	25.000	
10	Pemeriksaan SGPT	7.500	17.500	25.000	
D	PEMERIKSAAN LAINNYA				
1	Pemeriksaan Hbs Ag	22.500	52.500	75.000	
2	Pemeriksaan Hbs Ab	15.000	35.000	50.000	
3	Pemeriksaan Malaria	12.000	28.000	40.000	
4	Pemeriksaan Feases	15.000	35.000	50.000	
5	Pemeriksaan BTA	10.500	24.500	35.000	
6	Pemeriksaan HIV	22.500	52.500	75.000	
7	Pemeriksaan Rapid Test Lengkap (HbsAg, Sifilis, HIV)	60.000	120.000	180.000	
8	Pemeriksaan Rapid antigen Covid 19	30.000	70.000	100.000	
9	Pemeriksaan Rapid Test sifilis	22.500	52.500	75.000	
10	Pemeriksaan Sampel Air/Sampel Makanan (diluar biaya transportasi/akomodasi)	180.000	420.000	600.000	

Keterangan: Biaya transportasi/akomodasi petugas antar sampel mengikuti standar perjalanan dinas daerah.

10. Pelayanan Ambulan Dan Rujukan

		Kompon	ien Jasa	
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Ambulance			
	a. <10 Km	42.000	98.000	140.000
	b. >10 Km penambahan per km	4.500	10.500	15.000
2	Biaya akomodasi pelayanan Rujukan dengan Petugas (per 1 pendamping dan 1 sopir)			
	a. Dalam daerah	114.000	266.000	380.000
	b. Luar daerah	336.000	784.000	1.120.000
3	Pelayanan Ambulance Jenazah			
	a. <10 Km	42.000	98.000	140.000
	b. >10 Km, penambahan per Km	4.500	10.500	15.000
4	Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K) :			
	a. ≤ 8 jam kegiatan	300.000	700.000	1.000.000
	b. > 8 jam kegiatan di Tambah biaya akomodasi per petugas	57.000	133.000	190.000

Keterangan: Pelayanan Ambulance mengikuti harga BBM terbaru, dan tidak termasuk biaya Fery, Tarif Tol dan lain-lain.

11. Pelayanan Medicolegal

		Kompon	Komponen Jasa		
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)	
1	Pelayanan Salinan Resume Medis Pasien.	15.400	19.600	35.000	
2	Pembuatan Surat Keterangan Kematian di Masyarakat.	15.400	19.600	35.000	
3	Resume medis non Asuransi	15.400	19.600	35.000	
4	Resume Medis Untuk Klaim Asuransi	15.400	19.600	35.000	

12. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

		Kompon	Komponen Jasa		
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)	
1	Perawatan Jenazah Muslim Dewasa	330.000	770.000	1.100.000	
2	Perawatan Jenazah Non Muslim	240.000	560.000	800.000	
3	Perawatan Jenazah Balita (0 - 5 tahun)	90.000	210.000	300.000	
4	Perawatan Jenazah Anak	150.000	350.000	500.000	
5	Penggunaan Formalin	67.500	157.500	225.000	
6	Peti Jenazah	450.000	1.050.000	1.500.000	

Keterangan: Perawatan Jenazah tidak termasuk APD Petugas

13. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (home care)

	Pelayanan	Kompon		
No.		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
1	Dokter Umum	100.000	-	100.000
2	Perawat , Bidan, ATLM, Nutrisionis	70.000	-	70.000
3	Fisioterapis	70.000	-	70.000
4	Terapi Wicara	70.000	-	70.000
5	Psikolog	70.000	-	70.000

Apabila dilakukan tindakan maka biaya tindakan sesuai dengan tarif biaya tindakan yang sudah ditetapkan.

Biaya pemakaian obat dan BMHP ditetapkan sesuai tarif yang sudah ditetapkan. Jenis Layanan Home care:

1. Perawatan orang sakit di rumah (home care service) pada pasien

Penulihan pasca rawat inap
 Pasien dengan stroke; dan
 Pasien dengan penyakit kronik seperti: Gagal ginjal, diabetes dll.
 Perawatan luka di rumah (Home wound care) pada:

a. Pasien dengan luka diabetes; b. Pasien luka dekubitus;

c. Pasien luka bakar; dan d. Pasien post khitan

6. Perawatan kesehatan lainnya:

a. Pasang sonde;
b. Pemasangan selang kencing;
c. Pemasangan selang NGT/lambung;
d. Pemeriksaan laboratorium; dan

e. Konsultasi gizi.

B. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. RAWAT JALAN

a. Pemeriksaan Rawat Jalan

	Jenis pelayanan	Frekuensi	Kompor	Komponen Jasa		
No.			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	a. Poliklinik Umum	Per Pasien	5.200	15.100	20.300	
	b. Poliklinik Spesialis	Per Pasien	5.900	29.000	34.900	
2	Emergency (IGD)					
	a. Dokter umum/gigi	Per Pasien	17.700	15.100	32.800	
	b. Dokter spesialis (Visite/konsultasi)	Per Pasien	37,300	29.000	66.300	
3	a. Perawatan One Day Care/Intermediate Care	Per pasien	154.000	121.000	275.000	
	b. Asuhan Keperawatan	Per Pasien	12.500	60.000	72.500	

b. Tindakan Medis Non Operatif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

	Jenis pelayanan	Frekuensi	Kompor		
No.			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	12.500	20.900	33.400
2	Sedang	Per Tindakan	23.600	39.300	62.900
3	Besar	Per Tindakan	50.800	84.700	135.500
4	Khusus	Per Tindakan	67.300	112.100	179.400

c. Tindakan Medis Non Operatif IGD

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Kompon		
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	6.800	20.900	27.700
2	Sedang	Per Tindakan	45.100	39.300	84.400
3	Besar	Per Tindakan	246.400	84.700	331.100
4	Khusus	Per Tindakan	475.200	112.100	587.300

d. Tindakan Gigi Dan Mulut

No.	Jenis pelayanan		Kompor		
		Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	15.000	55.000	70.000
2	Sedang	Per Tindakan	35.000	80.000	115.000
3	Besar	Per Tindakan	166.300	532.000	698.300
4	Khusus	Per Tindakan	332.500	1.064.000	1.396.500

2. RAWAT INAP

a. Rawat Inap

			Komponen Jasa		
No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Visite dokter spesialis				
	Rawat Inap kelas III	Per kunjungan	18.200	32.200	50.400
	Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU	Per kunjungan	36.300	140.700	177.000
2	Visite dokter umum				
	Rawat Inap kelas III	Per kunjungan	9.100	23.200	32.300
	Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU	Per kunjungan	18.200	93.800	112.000
3	Konsultasi dokter spesialis				
	Rawat Inap kelas III	Per kunjungan	18.200	32.200	50.400
	Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU	Per kunjungan	36.300	140.700	177.000

			Kompon	en Jasa	
No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Jasa Asuhan Keperawatan				
	Rawat Inap kelas III	Per hari	10.000	50,000	60,000
	Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU	Per hari	50.000	100,000	150,000
5	Pelayanan Gizi				
	Rawat Inap kelas III	Per hari	10.000	13.200	23.200
	Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU	Per hari	22.000	25.000	47.000
6	Tindakan Medis non operatif Ruang rawat inap :				
	a. Kecil	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		15.800	26.400	42.200
	Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU		31,700	52.800	84.500
	b. Sedang	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		31.200	52.000	83.200
	Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU		62.400	104.000	166.400
	c. Besar	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		58.400	97.300	155.700
	Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU		116.700	194.500	311.200
	d. Khusus	Perpaket			
	Rawat Inap kelas III		135.800	226.300	362.100
	Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU		271.500	452.500	724.000
7	Tarif kamar				
	Rawat Inap kelas III	Per hari	47.000	-	47.000
	Ruang ICU/ICCU/NICU/ PICU	Per hari	320.400	-	320.400

b. Kebidanan Dan Perinatologi

			Kompon	Komponen Jasa			
No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)		
1	2	3	4	5	6		
1	Persalinan normal	Per Tindakan	493.700	822.800	1.316.500		
2	Persalinan dengan tindakan pervaginam	Per Tindakan	697.000	1.161.600	1.858.600		
3	Manual Plasenta	Per Tindakan	326.100	543.600	869.700		
4	Pelayanan bayi baru lahir	Per Tindakan	246.800	411.400	658.200		

3. PELAYANAN BEDAH SENTRAL

Tindakan Medis Operatif

			Kompon	m .c		
No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	Kecil	Per Tindakan	617.100	337.900	955.000	
2	Sedang	Per Tindakan	1.388.500	1.453.200	2.841.700	
3	Besar	Per Tindakan	2.560.500	3.049.500	5.610.000	
4	Khusus	Per Tindakan	5.441.000	3.270.600	8.711.600	

4. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a. Pelayanan Rehabilitasi MedisTindakan Fisioterapi

			Kompor	nen Jasa		
No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	Kecil	Per Tindakan	13.000	22.500	35.500	
2	Sedang	Per Tindakan	24.000	39.000	63.000	
3	Besar	Per Tindakan	51.000	85.500	136.500	
4	Khusus	Per Tindakan	120.000	230.000	350.000	

b. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

			Kompor	ien Jasa		
No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	Kecil	Per Pemeriksaan	5.500	9.000	14.500	
2	Sedang	Per Pemeriksaan	18.000	11.000	29.000	
3	Besar	Per Pemeriksa an	25.000	17.000	42.000	
4	Khusus	Per Pemeriksaan	36.000	55.000	91.000	

c. Pelayanan Radiodiagnostik

			Kompor	m :c		
No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	Pemeriksaan non kontras					
	Pemeriksaan kecil	Per Pemeriksaan	10.000	40.000	50.000	
	Pemeriksaan sedang	Per Pemeriksaan	20.000	70.000	90.000	

			Kompor	Komponen Jasa			
No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)		
1	2	3	4	5	6		
	Pemeriksaan besar	Per Pemeriksaan	130.000	180.000	310.000		
	Pemeriksaan khusus	Per Pemeriksaan	220.000	600.000	820.000		
2	Pemeriksaan dengan kontras						
	Pemeriksaan kecil	Per Pemeriksaan	57.000	120.000	177.000		
	Pemeriksaan sedang	Per Pemeriksaan	288.000	450.000	738.000		
	Pemeriksaan besar	Per Pemeriksaan	356.000	550.000	906.000		
	Pemeriksaan khusus	Per Pemeriksaan	385.000	800.000	1.185.000		

d. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

			Kompor			
No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	Kecil	Per Tindakan	35.000	58.000	93.000	
2	Sedang	Per Tindakan	48.000	80.000	128.000	
3	Besar	Per Tindakan	100.000	200.000	300.000	
4	Khusus	Per Tindakan	259.000	204.000	463.000	

e. Konsultasi Gizi

			Kompo	nen Jasa	
No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Ahli gizi	Per Pasien	7.500	15.000	22.500

IV. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. Pelayanan Farmasi

				Saran elayana		
No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif(Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	Visite rawat inap	Per Pasien	2.250	10.000	12.250	
2	Konseling obat	Per Pasien	1.750	10.000	11.750	

B. PELAYANAN MEDIKO LEGAL, TRANSPORTASI DAN PEMULASARAN JENAZAH

1. Pelayanan Transportasi

No.	Jenis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan/ orang (Rp)	Tarif (Rp/Km)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Ambulance	4.000	7.200	11.200	Tarif ditambah BBM
2	Ambulance Speed	14.000	16.000	30.000	sesuai jarak tempuh (5 km = 1 L) Tarif antar pulau dengan
3	Mobil Jenazah	4.000	7.200	11.200	menggunakan ferry, kapal laut disesuaikan dengan biaya transportasi yang berlaku

2. Pemulasaran Jenazah

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
1	Penyimpanan Jenazah (1-2 hari)	Per Hari	32.650	54.450	87.100	
2	Perawatan Jenazah					
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	45.375	75.625	121.000	
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	90.750	151.250	242.000	
3	Pengawetan Jenazah					
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	103.475	172.425	275.900	
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	172.425	287.375	459.800	
4	Pemeriksaan Histologi Forensik					
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	59.895	99.805	159.700	
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	98.050	163.350	261.400	
5	Otopsi/ Bedah Mayat					
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	344.850	574.750	919.600	
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	453.750	756.250	1.210.000	

TINDAKAN-TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN

1. TINDAKAN MEDIS UGD

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Aff drain / tampon	1	Aff gips/lokasi tindakan	1	Aff hecting > 10	1	DC shock	1	Ambil sample darah
2	Aff Hecting < 5 + rawat luka	2	Aff heacting 5-10	2	ekstraksi korpal + incisi	2	RJP (resusitasi Jantung paru)	2	memberikan obat makan ke pasien
3	Aff infuse/NGT/Kateter/ETT	3	Ambil darah arteri	3	exterpasi kuku	3	Torakosintesis	3	mengantar pasien ke ruangan
4	Ambil darah vena dewasa	4	Ambil darah vena anak/bayi	4	Heating >10	4	Corpal mata	4	mengantar pasien rontgen
5	Bladder training	5	Bilas lambung DEWASA/BAYI	5	Infus umbilikal	5	Injeksi intracardiac	5	Mengganti cairan infus
6	Debridement	6	Corpal Hidung/telinga	6	Inkubator	6	Kontrol istimewa (observasitiap 15 menit)	6	Pengkajian
7	Heating 1 - 5 jahitan	7	foto terapi	7	Intubasi	7	Nekrotomi	7	Perawatan tali pusat
8	Injeksi (iv, im, sc,ic)	8	Ganti balutan + angkat jahitan >5-10	8	Kateterisasi pada retensio urin	8	Pasang ET	8	Perbeden
9	Irigasi kateter	9	Heating 6 – 10	9	Klisma	9	Pasang gips	9	perencanaan dan dokumentasi
10		10	Immobilisasi pada fraktur (spalk) tangan/tindakan	10	Massage punggung/pijat oxitocyn	10	Pasang infus umbilical		
11	Klisma letak rendah	11	Inspekulo	11	Nebulasi	11	Pasang infuse perostea		
12	Observasi DJJ	12	Irigasi Mata/hidung/TELINGA	12	Pasang Endotracheal Tube	12	Pasang kateter suprapubic		
13	Pasang Drumbuis	13	Lepas gips	13	Pasang bed site monitor	13	Pasang Ventilator		
14	Pasang drumbuis/rectal tube	14	Mengambil darah arteri / AGD	14	Pasang CPEP	14	Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka		
15	Pasang infus dewasa	15	Nebulizer	15	Pasang DC bayi/anak	15	Pungsi pleura /WSD		
16	Pasang mitela / arm sling	16	Perawatan luka dekubitus gr II-III	16	Pasang infuse bayi/anak	16	Rawat gangren grade IV dengan resiko perdarahan		
17	Pasang Pulse Oksimetri	17	Pasang arm/U slab	17	Pasang NGT bayi/Anak	17	Resusitasi Bayi		
18	Pasang verband elastis/ransel/mit ela	18	Pasang bedside monitor	18	Pasang Spalk Kaki	18	Sirkumsisi		
19	Pemasangan oksigen	19	Pasang cateter	19	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas Bawah	19	Supra pubic pungsi		
20	Pemberian obat suposutoria	20	Pasang gips tanpa narkose	20	Pasang traksi (orthopedic)	20	Vena seksi		
21	Perawatan luka bakar dewasa < 15%	21	Pasang infus bayi/anak	21	Pemasangan balon servix				

Tindakan kecil			Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
22	Perawatan luka post op (jahitan <5)	22	Pasang infuse pump	22	Perawatan bayi diinkubator				
23	Rectal tussae	23	Pasang laminaria	23	Perawatan luka bakar>25%				
24	Skin test	24	Pasang NGT dewasa	24	Perawatan luka bersih/luka postop >10 jahitan				
25	Transfusi	25	Pasang OPA	25	Perawatan luka dengan kontrol perdarahan				
26	Vaginal toilet	26	Pasang ransel perband	26	Perawatan Luka gangren /ulkusgr IV				
27	Vaginal tussae	27	Pasang skletal traksi	27	Rawat gangrene grade IV				
28	Vaskular Dopler Terbatas	28	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas atas	28	Resusitasi jantung paru				
29	Wound toileting	29	Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)	29	Resusitasi/CPR				
30	Perawatan Luka gangren /ulkusgr I	30	Perawatan luka bakar 10%- 25%	30	Suction				
		31	Perawatan luka bersih/luka post op 5-10 jahitan						
		32	Perawatan luka op dengan infeksi						
		33	Peurperium						
		34	Resusitasi cairan						
		35	Tindakan dengan blood warmer						
		36	Tindakan dengan infant warmer						
		37	Perawatan Luka gangren /ulkus gr II –III						

Catatan:

2. TINDAKAN RAWAT JALAN

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Aff drain / tampon	1	Aff gips/lokasi tindakan	1	Aff hecting > 10	1	Corpal mata
2	Aff Hecting < 5 + rawat luka	2	Aff heacting 5-10	2	ekstraksi korpal + incisi	2	Pasang gips
3	Aff NGT/Kateter	3	Ganti balutan + angkat jahitan >5-10	3	exterpasi kuku	3	Pasang kateter suprapubic
4	Debridement	4	Heating 6 – 10	4	Heating >10	4	Pasang Ventilator
5	Heating 1 - 5 jahitan	5	Inspekulo	5	Kateterisasi pada retensio urin	5	Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka
6	Injeksi (iv, im, sc,ic)	6	Irigasi Mata/hidung/TELINGA	6	Pasang DC bayi/anak	6	Rawat gangren grade IV dengan resiko perdarahan
7	Pasang verband elastis/ransel/mitela	7	Perawatan luka dekubitus gr II-III	7	Pasang NGT bayi/Anak	7	Supra pubic pungsi

⁻ Tarif dihitung pertindakan per lokasi

	Tindakan kecil	Tindakan Sedang			Tindakan Besar	Tindakan Khusus		
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	
8	Pemasangan oksigen	8	Pasang arm/U slab	8	Pasang Spalk Kaki	8		
9	Perawatan luka bakar dewasa < 15%	9	Pasang cateter	9	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas Bawah	9		
10	Perawatan Luka gangren /ulkus gr I	10	Pasang ransel perband	10	Pasang traksi (orthopedic)	10		
11	Perawatan luka post op (jahitan <5)	11	Pasang NGT dewasa	11	Perawatan luka bakar>25%	11		
12	Rectal tussae	12	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitasatas	12	Perawatan luka bersih/luka post op >10 jahitan	12		
13	Vaginal tussae	13	Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)	13	Perawatan luka dengan kontrol perdarahan	13		
14	Vaskular Dopler Terbatas	14	Perawatan luka bakar 10%- 25%	14	Perawatan Luka gangren /ulkus gr IV	14		
15	Wound toileting	15	Perawatan luka bersih/luka post op 5-10jahitan	15		15		
16		16	Perawatan luka op dengan infeksi	16		16		
17		17	Peurperium	17		17		
18		18	Perawatan Luka gangren /ulkus gr II - III	18		18		

Catatan:

- Tarif dihitung pertindakan per lokasi

3. TINDAKAN RAWAT INAP

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	No. Tindakan		Tindakan
1	Aff drain / tampon	1	Bilas lambung DEWASA/BAYI	1	Infus umbilikal	1	Bilas lambung pada Intoksikasi	1	Pengkajian
2	Aff infuse, Aff ngt, aff cateter, aff ogt	2	Foto terapi	2	Inkubator	2	2 Control istimewa lebih dari 15 menit		perencanaan dan dokumentasi
3	Bilas Lambung	3	Ganti balutan + angkat jahitan >5	3	Intubasi	3	Infus Intraoseous	3	Ambil sample darah
4	Bladder training	4	Inspekulo	4	Kateterisasi pada retensio urin	4	Nekrotomi	4	Bilas lambung bayi
5	Debridement	5	Lepas gips	5	Kemoterapi	5	Pasang tampon Belloque	5	Informasi pasien (inform consent)
6	EKG	6	Mengambil darah arteri / AGD	6	Klisma	6	Pemeriksaan NST, OCT, CTG	6	Injeksi
7	Gati balutan + angkat jahitan < 5	7	Nebulizer	7	Massage punggung/pijat oxitocyn	7	Perawatan kolostomi	7	Massage punggung
8	Irigasi kateter	8	Nebulizer mix	8	Nebulasi	8	Perawatan open prostatectomy	8	Memandikan bayi
9	Irigasi Mata/Telinga	9	Pasang arm / back slab	9	Pasang Endotracheal Tube	9	Perawatan WSD	9	Memandikan pasien
10	Observasi djj	10	Pasang cateter	10	Pasang bed site monitor	10	Pijat bayi	10	Memberi makan bayi
11	Pasang drumbuis/rectal tube	11	Pasang gips tanpa narkose	11	Pasang CPEP	11	Pungsi pleura	11	Mengganti cairan infuse/darah (padatransfuse)
12	Pasang infus dewasa	12	Pasang infus bayi/anak	12	Pasang infuse bayi/anak	12	Senam hamil	12	Menimbang bayi
13	Pasang wing needle/IV Cath (venflon)	13	Pasang laminaria	13	Pasang traksi (orthopedic)	13	Senam nifas	13	Monitor cairan
14	Pasang neckollar	14	Pasang ngt	14	Pasang ventilator	14	Treadmill	14	Monitor vital sign
15	Pasang Pulse Oksimetri	15	Pasang OPA/NFA	15	Pemasangan balon servix	15	Vena sectie	15	Pasang oksigen
16	Pemberian suppositoria	16	Pasang ransel perband	16	Perawatan bayi diinkubator	16	Perawatan Luka bakar >45 %	16	Pemberian diit per sonde
17	Pengambilan sampel darah dewasa	17	Pasang skletal traksi	17	Resusitasi cairan	17	DC Shock	17	Pemberian obat per oral

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
18	Perawatan luka bakar Anak < 10%	18	Pasang spalk/bidai (orthopedic)	18	Resusitasi/CPR			18	Perawatan bayi di inkubator
19	Perawatan luka bakar dewasa < 15%	19	Perawatan Luka bakar 15-25 %	19	Transfusi tukar pada bayi			19	Perawatan mulut pasien tak sadar
20	Perawatan luka post op (jahitan <10	20	Perawatan luka Post op dengan infeksi	20	Perawatan Luka bakar 25-45%			20	Perawatan payudara
21	Rectal tussae	21	Perawatan luka post op (jahitan <10)	21	Perawatan luka gangren/ulkus grIV		1	21	Perawatan tali pusat
22	Skin test	22	Peurperium					22	Perbeden
23	Transfusi/ hari	23	Suction/hari					23	Puerperium
24	Vaginal toilet	24	Tindakan dengan blood warmer					24	Seka pasien
25	Vaginal tussae	25	Tindakan dengan infant warmer						
26	Vaskular Dopler Terbatas	26	Pemakaian Bedside Monitor dan Pulse oksimetri						
27	Pasang tampon	27	Pemakaian infus Pump/syringe pump/hari						
28		28	Perawatan Luka Ulkus/Gangren Gr II-III						

4. TINDAKAN MEDIS PENYAKIT DALAM 1. TINDAKAN NON OPERATIF

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan		
1	Spirometri		Aspirasi linofonodi untuk sistologi	1	ВМР				
2	Tes Mantoux	1	Pungsi cairan ascites	2	Aspirasi Jarum Halus hati				
3	Injeksi Adrenalin	2	Pungsi bulu-buli	3	Etanol terapi				
		3	Resusitasi cardio pulmonal	4	Pungsi lumbal				
		4	Intubasi Endotracheal	5	Pungsi sinovial				
		5	Cateter umbilical	6	Pungsi abses hati				
		6	Inhalasi	7	Skin Test/Patch				
		7	Mono Filamen Test						
		8	Vibration Test				0000 - 11		
		9	Ankle Brachial Index Test						

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil			Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan		
1	Anoskopy	1	Endoskopi Esophagus	1	Endoskopi Duodenum	1	Endoskopi dengan Ligasi		
2	Endoskopi hidung	2	Colonoscopy	2	Colonoscopy	2	Kolonoskopi dengan Biopsi		
3	Sigmoidoscopy	3	Rectosigmoidoscopy	3		3	Kolonoskopi dengan Polipektomi		
	,					4	Kolonoskopi tanpa biopsi		

5. TINDAKAN ORTHOPEDI DAN TRUMA

1. TINDAKAN NON OPERATIF

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Perawatan Luka Post op <5 jahitan	1	Pasang Elastis Verban	1	Pasang Gips AEC/U Slab	1	Reposisi
2	Injeksi	2	Pasang Gips BOOT CAST	2	Skin Traksi	2	Injeksi Intra artikular
3	Pasang Spalk/Bidai						
4	Pasang Mitella/arm sling						

2. TINDAKAN OPERATIF

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Debridement dengan local anestesia	1	Closed reduction alone	1	Long arm cast	1	Reduksi tertutup dengan lokal anastesi
2	Pasang elastis bandage	2	Buka gips	2	Long leg cast	2	Revisi gips
3	Pasang arm sling	3	Pigure of eight bandage	3	Short leg cast	3	Aspirasi sendi/injeksi intraartikuler
4	Pasang neck collar	4	Robert jones bandage	4	Kocher cast	4	Simple implant removal
5	Buddy taping	5	Wedging cast	5	Patellar tendon bearing (PTB) cast	5	Reposisi CTEV (Posetti)
6	Drainage of deep muscle abscess	6	Splint extrimitas atas	6	Tumb spica cast	6	Pasang body jacket
7	Excision og ganglion, lipoma	7	Splint extrimitas bawah	7	Pasang U-slab	7	Minerva jacket
8	Plaster application of extremity and spine	8	Amputation Jari Tangan atau Kaki	8	Skin traction	8	Hemispica cast
9	Skeletl traction	9	Arthodesis sendi kecil	9	Boot cast	9	Shoulder spica cast
10	Pins and wire removal by local procedure	10	Open biopsy	10	Hanging cast	10	Open reduction and internal Fixation
11	Major desloughung, wound debridement	11	Bone Grafting	11	Removal implant	11	Open reduction and extern Fixation
12	Manipulation and reduction of simple fracture and dislocation (including plaster application)	12	Eksisi arthroplasty sendi kecil	12	minimal invasive K-wire Osteosyntesis(MIKO)	12	Corrective surgery of bone and joint deformities (contracture, malunion, neglected, high tibial osteotomy, low femoral osteotomy)
13	Simple amputation distal to metacarpal-single digit	13	Fasciotomy	13	Debridement dengan general Anestesia	13	Recontructive surgery of the shoulder (cg puttiplatt, Bristow, Brankart)
14	Decopresision of tendon sheath and synovial (eg. Trigger finger)	14	Removal K-Wire	14	Decompression of nerve entrapment (eg.De'Quervain, trigger finger)	14	Reconstructive surgery of habitual patella dislocation
15	Synovectomy of small joints	15	Flap pada Finger tip injuries	15	Single Nerve repair	15	Amputation of the arm, forearm, above or belowknee
16	Fasciotomy for vascular insufficiency	16	Amputation distal to metacarpal-multiple digits	16	Repair Single Tendon	16	Four quarter amputation
17	Repair of single ectensor tendon	17	Decompression of nerve entrapment syndromes (carpal tunnel syndrome, cubital)	17	Clesed reduction + immobilization with casting (black slab or Circular Cast)	17	Hind Quarter amputation
18	Simple tenotomy	18	Excision arthoplasty of small joints	18	Closed reduction + immobilization With U-Slab	18	Synovectomy sendi besar
19	Biopsy	19	Removal of implants (plate, nail, screws)	19	Excision benign tumor	19	Excision benign tumor + bone graf
20	Bone grafiting alone	20	Single digital nerve repair	20	Skin Graft	20	Excision malignant tumor + bone graft
	7	21	Arthrodesis of small joints	21	Arthroplasty of small joints- replacement	21	Disarticulation of large joint

	kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
		22	Open reduction and internal fixation with wire (eg. TBW patella, olectranon) and screws (eg. Tibial plateu, condyle fracture)	22	Open reduction (plate, screw,nail) & internal fixation	22	Arthrodesis sendi besar
		23	Operating on the clavicle, acromion, scapula and acromia claviculas joints (fracture and dislocation)	23	Open reduction (external fixation) & internal fixation	23	Triple arthrodesis
		24	Repair of multiple extensor tendon.	24	Simple osctotomy, eg. corrective Osteochondroma	24	multiple tendon repair
		25	Wound debridement for major crush injuries	25	Operation for halus valgus	25	Multiple Nerve and tendon repair
		26	Amputation of the arm, for earm, BK, and AK	26	Ecision of benign (harmartoma) eg. Osteochondroma	26	Repair Vessel (Including grafting)
		27	Arthroscopie diagnostic (artroscopi alone)	27	Resction arthroplasti	27	Repair Achilles tendon
		28	Arthroscopie wash out	28	Interposition arthoplasty	28	Hemiarthroplasty procedure
		29	Synovectomy of large joint	29	Multiple flexor tendon repair	29	Arthroplasty resection
				30	Repair of large vessels including grafting	30	Flap in limb reconstruction
				31	Repair of single major nerve eg. Medianulnar or multiple digital nerve	31	Tendon transfer
				32	Single flexor tendon grafting	32	Tendon Grafting
				33	Single tendon transfer	33	Arthroscopic debridement
				34	Operation for union and nonunion delayed	34	Cervical laminoplasty
				35	Artrhodesis of large joints	35	Decompression laminectomy for HNP, tumor or spinal stenosis
				36	Multiple tendons transfer	36	Soft tissue, and tendon release of mucle cerebral palsy
				37	Multiple tendons grafting	37	Arthtrosopic debridement.
				38	Open reduction and internal fixation with angled blade plate, DHS	38	Ligament reconstructive surgery
				39	Arthroscopic surgery (patial menissctomy removal of loose bodies)	39	Anterior Cruciate Ligament Recontruction by Arthroscopic surgery
						40	Posterior Cruciate Ligament Reconstruction by arthroscopic surgery
						41	
						42	
						43	Total elbow replacement
						44	Total hip replacement
				 		45	Total knee replacement
				<u> </u>		46	Correction of total sholder replacement
						47	Correction of total elbow replacement
						48	Correction of total knee replacement
						49	Correction of total hip replacement

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
						50	Debridement and anterior fusion of spine
						51	Debridement and posterior fusion of spine
						52	Decompression laminectomy and stabilization of spine
						53	Instrument of the spine (scoliosis, frcture of fracture dislocation)
						54	Multiple nerve grafting, (eg. Brachial plexus injury)
						55	and neuromuscular transfer
						56	limb
						57	Replantation surgery of upper or lower limb
						58	spondylitis.
							Hermiarthoplasty eg. Austin moore prosthese, Thompson prothese
						60	Triple arthrodesis
						61	Open reduction and screw fiation of acctabular lips fracture
	,					62	deformities and contractus (malunion, neglected, high tibial osteotomy, low femoral osteotomy)
						63	Major of tissue, muscel and tendon release indeformities of cerebral palcy.
						64	Major exicion of malignant tumor.
						65	Revascularization of digits (reimplantation of single digit)
						66	
						67	
						68	Decompresstion laminectomy for HNP, tumorand spinal stenosis
						69	Open reduction and plate screw fixtation of acetabular fracture (collum fracture, transverse fracture)
						70	
						71	Total join replacement, eg: total knee, total hip
						72	Fore quarter amputation & nind quarter amputation
						73	Replantation surgeryof upper and lower limb

74	Instrumentation of spine (scoliosis, fracture)
75	Nerves grafting, interfasciculaar repair & neuromuscular transverse.
76	Free vascullaried bone grafting
77	Ligament reconstructive surgery
78	Multiplenervers repair, eg: branchial plexus
79	Open door laminoplasty

6. TINDAKAN MEDIS BEDAH

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Perawatan Luka Post op < 5 jahitan	1	Perawatan Luka Post op 5-10 jahitan	1	Incisi/Eksisi	1	Sirkumsisi
2	Injeksi (IC,IV, IM, SC)	2	Perawatan Luka Infeksi diameter <5 cm	2	Kauteterisasi Veruca	2	ekstirpasi
3	Debridemet	3	Aff hecting 5-10 jahitan	3	Perawatan Luka Infeksi diameter 5- 10cm		
4	Wound Toilet			4	Perawatn Luka Post Op > 10 jahitan		
5	Aff Hecting < 3 jahitan			5	Aff hecting > 10 jahitan		

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Paracentese	1	Circumsisi dengan penyulit (phimosis, balanitis, batu uretra)	1	Polypectomy	1	Hernia anak dengan komplikasi
2	Incisi	2	Excise. incise tumor region head and neck	2	Colostomy	2	Batu buli- buli anak
3	Jahit luka	3	Lumpectomy tumor mamae jinak	3	IDW atau IMW	3	Laparatomy anak
4	Corpal superficial	4	Section alta	4	Aff plating/ implant	4	Prostatectomy open
5	Negel extraksi	5	Appendectomy tanpa penyulit	5	Spermatocele ligasi	5	Strumectomy dengan penyulit
6	Cystotomy closed	6	Fistal/ sinus superficial	6	Haemoroidectomy	6	Ligasi Hydrocele anak
7	Eksterpasi tumor jinak (lipoma, ateroma) dengan local anastesi	7	Rekontruksi keloid	7	Fistula perianal	7	Colostomy pada anak
8	Ekstirpasi kecil(Ateroma, Lipoma, Ganglion, Nevus)	8	Corpal profunda dalam terbuka	8	Amputasi sendi besar	8	Realease kontraktur + skin graff/ plafing
9	Circumsisi	9	Repair hecthting dehisensi dengan G.A	9	Batu saluran kencing non buli-buli	9	Laparoscopy operative
10	Debridement kecil	10	Open cystostomy	10	Biopsy prostate (optu)	10	Open reduction internal fixasi (implant)
11	Eksplorasi	11	Incisi biopsy tumor ganas	11	semua jenis penyakit tumor ganas	11	Nephrektomi
12	Biopsi tumor jinak superficial	12	Meatotomy	12	Sinus	12	laparatomi cholecystectomy
13	Drainage jaringan terbuka	13	Vasectomy	13	Atresi ani tanpa penyulit	13	Splenektomi
14	Reposisi terbuka sendi kecil	14	Amputasi sendi- sendi kecil	14	Repair rekontruksi trauma wajah	14	Laparatomi reseksi anastomose usus
15	Reheacting dehisense	15	Labio pasty unilateral	15	Labioplasty bilateral	15	Radical mastectomy
16	Razor plasty kuku	16	Repair rekontruksi rupture tendon	16	Herniotomy tanpa komplikasi	16	Amputasi sendi besar

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar	Tindakan Khusus		
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	
17	Ekstraksi Ungium	17	Necrotomy < 15%	17	Appendectomy dengan penyulit	17	Rekontruksi atresia ani dengan penyulit	
18	Ekstraksi Kuku, Rozer Plasty	18	Insisi abses GA	18	Necrotomy >15%	18	Rekontruksi repair vascular tendon musclepada crush injury	
19	Incisi drainase abses- curetase	19	Eksisi tumor > 5 cm	19	Hernioplasty (MESH)	19	Rekontruksi bilateral labioplasty danpalatoplasty	
20	Eksisi tumor < 5 cm	20	Sirkumsisi GA	20	Varicocele.Hodrocele	20		
21	Biopsi GA	21	Sistostomi	21	Reposisi Fr.nasal	21	RPG, TUR,URS	
22	Fungsi hematoma GA	22	FAM	22	Eksisi luas + rekontruksi	22	Laparotomi, Eksplorasi	
23	Vasectomi	23	Aff DJ stent	23	Vasikilothomi	23	Pyololithomi	
24	Bounginasi	24	Release tendon	24	Hidrokelektomy	24	Batu ureter uretralithotomi	
25	Pasang cateter dengan maindrain	25	Biopsi GA	25	Kolostomi	25	Batu ureter napolithotomi	
26	Venasectio	26	Debridement luas	26	Ekstirpasi/eksisi dengan kosmetik	26	Palatoplasty	
27	Punksi pleura	27	Hernia, Hidrocele	27	Ligasi fungsi pada varicocele	27	Skin graft luas	
28	Resposisi fraktur tertutup/dislikasi sederhana	28	Batu buli buli	28	Repair aurika/telinga	28	Skirktur uretra	
29	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	29	Penyakit pembuluh darah perifer	29	Trakeostomi	29	Nefrektomy	
		30	Tumor jinak kulit, subkutis, payudara, parotis di leher/muka tanpa komplikasi	30	Eksplorasi testis	30	Duhamel	
		31	Bibir sumbing	31	Skin graft luas	31	Strumektomy/thyroidektomi/Isthmolobektomi	
		32	Kelainan tangan bawaan	32	Simple mastektomi	32	Operasi Oesofagus	
		33	Luka bakar >10% tanpa operasi	33	Skin flap	33	Gastrektomi	
		34	Gigitan binatang	34	Labiopasty	34	Kolodokojejunostomi	
		35	Diskolasi sendi, bahu, siku, pergelangantangan, panggul, tumit, simpisis rahang	35	Hyspopadia	35	Flap Jnuh	
		36	Ekstraksi korpus aleinum dalam	36	Kontraktur	36	Hemorrhoidektomi dengan stapler	
		37	Chest tube + WSD	37	Tendoplasty compleks	37	Labioplasty	
		38	Skin graft	38	Orchidoplexi	38	Prostatektomi	
		39	Varikokel	39	Orchidektomi ligasi tinggi	39	Reseksi + anastomosis instestinal	
		40	Hidrokel	40	Fistulektomi	40	Renoraphy	
		41	Tendoplasty simple	41	Kelainan bawaan tulang muka, jaringan lunak muka neorofibroma, dan lain-lain	41	Miles operation	
		42	Repair luka wajah (kosmetik)	42	Peritodiktomi	42	Operasi hisprung	
		43	Fistulotomi	43	Rinoplastik	43	Pankreatektomi/Cystojejonostomi	
		1		44	Rekonstruksi hidung	44	Kolesistektomi	
				45	Apendisitis, infiltrate	45	*	
				46		46		
				47	Insersi Kateter double lumen	47	Splenektomi	
						48	Reseksi hepar/repair rupture hepar	
		1				49	Splenoraphy	
						50	Mandibulektomi	
						51	Eksisi tumor sclap/cranium	

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
						52	Ureterolithotomi
						53	Divertikelektomi
						54	Pyeloplasti/ureteroplasty
						55	
-		-		-		=-	(inkarserrata)
-						56	3
		-				57	Radical nephrectomy
				-		58	Transplantasi ginjal
		1		-		59	Radical mastectomy
						60	Radical neckdissectomi
						61	Regional perfusion
						62	
						63	Scoliosis correction
						64	Anterior infusion
						65	Multiple fraktur dengan komplikasi
						66	Operasi vascular
						67	Transection
						68	Reseksi hepar, rectum
						69	Sachse
						70	Shunting
						71	Operasi jantung terbuka
						72	Coronary by pas
						73	Kriptorkimus, megakolon, hipospadia CTEVdan kelainan orthopedia lain

7. TINDAKAN MEDIS ANAK 1. TINDAKAN NON OPERATIF

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Mntoux test;	1	Pijat Bayi				
2	Imunisasi;	2	Nebulizer				
3	Tindik Telinga						
4	Rawat Tali Pusat						
5	Rektal Tauce						
6	Injeksi						
7	Rektal Supp						

8. TINDAKAN MEDIS SARAF

1. TINDAKAN NON OPERATIF

	Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan		
1	Injeksi syaraf Perifer (Intraartikuler	1	Injeksi Epidural	1	Pemeriksaaan Kognitif Lengkap (Analisa)		
2	Pasang Kateter	2	Lumbal Punksi	2			
3	Pasang NGT	3	Pemeriksaan Kognitif Sederhana (Mini mental state examination/MoCa Ina, Clock Drawing Test)	3			

9. TINDAKAN MEDIS THT 1. TINDAKAN NON OPERATIF

	Tindakan kecil	Tindakan Sedang			Tindakan Besar		Tindakan Khusus		
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan		
1	Pemeriksaan Garpu tala	1	Audiometri	1	Esopharyngoscopy	1	Bronchoscopy terapi		
2	Test bisik	2	ekstraksi corpal Orofaring	2	Direct laryngoscopy	2	Beloq Tampon		
3	toilet hidung	3	ekstraksi corpal htelinga	3		3	TEST BERRA		
4	toilet telinga	4	ekstraksi corpal hidung	4		4			
5	Ganti verband	5	Evakuasi cholesteatoma	5		5			
6	Angkat jahitan	6	Epitaksis packing posterior	6		6			
7	Angkat tampon hidung, sinus maxillaries dartinastoid	7	Nasopharyngoscopy	7		7			
8	Ear toilet	8	Rhynoscopy	8		8			
9	Ekstraksi cerumen	9	Skin test allergi/ pricks test	9		9			
10	Ekstraksi corpus alineum tenggorokan	10	Tympanometri	10		10			
11	Indirect laryngoscopy	11		11		11			
12	Pemasangan NGT	12		12		12			
13	Pasang infuse	13		13		13			

2. TINDAKAN NON OPERATIF

2.	TINDAKAN NON OPERATIF Tindakan	T	Tindakan	T	Tindakan		Tindakan Khusus
	kecil		Sedang		Besar		
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Biopsi tumor nasopharynx	1	Ekstirpasi pre auricle cyst	1	Eksisi tumor basal pada auricular	1	Temporal bone resection
2	Biopsi tumor cavum nasi	2	Eksisi tumor kecil pada auricle	2	Eksisi osteoma ear canal	2	Radical/ modified neck dissection
3	Biopsi tumor palatum	3	Ekstirpasi accessories	3	Cup ear	3	Total parotidectomy
4	Biopsi tumor tonsil	4	Ekstripsi branchial cyst	4	Mastoidectomy	4	Laringectomy
5	Biopsi tumor kecil mulut	5	Rekontruksi keloid	5	N.VII decompression	5	Microsurgical removal vocal cord lesion
6	Biopsi jaringa paranasal	6	Biopsi kelenjar leher	6	Thyroglosal duct cyst excision	6	Vocal cord stripping
7	Biopsy jaringan tumor telinga	7	Biopsi tumor sinus maxillaries buconginggivalapproach	7	Thyroidectomy parsial	7	Miryngoplasty
8	Biopsi tumor CAE Paracentese	8	Incisi drainage anses angina ludwig, retro pharyngeal	8	Sub maxillaris gland excision	8	Miryngoplasti/tymponoplasty type i
9	Ekstirpasi atheromacyst	9	Tracheostomi elektif	9	Eksisi tumor submental	9	Maksilektomi
10	Ekstirpasi jaringan granulasi CAR/telinga	10	Tracheostomi repai	10	Insisi drainage abses lateral cervical	10	Operasi oesophagus
11	Ekstripasi retroauricle cyst	11	Plastic skin repai simple	11	Insisi drainage abses parous	11	Pharyngoplasty
12	Ekstraksi Polip Telinga	12	Closed reduction nasal fracture	12	Parotidectomy superficial	12	Angiofibroma Nasofaring
13	Ekstraksi Corpus allienum Hidung	13	Intranasal antrostomy	13	Tracheostomy theraupetic	13	Palate plasty
14	Incisi pericondritis	14	Polypectomy satu sisi/ choanal polyp	14	Rhinoplasty	14	Palate repair
15	Incisi dan drainage abses peritonsiler	15	Ekstirpasi cysta naso alveolar, baso palativa	15	Palatoplasty	15	Reposisi/suspense maksila
16	Incisi septal abses	16	Konkhotomy	16	Caldwell luc satu sisi	16	Repair/reposisi tulang nasal
17	Incisi abses mastoid	17	Eksisi tumor jinak pada daerah muka	17	Ethmoidectomi	17	Revision labio + palatoplasty
18	Incisi abses brachial	18	Tonsilektomi	18	Orpantrel fustula repair	18	Revision Lip + palatoplasty
19	Incisi abses pre aurikuli/retroaurikuler	19	Adenoidectomy	19	Angiofibroma removal transpalatal	19	Rhinoplasty
20	Incisi abses CAR	20	Eksisi tumor lidah	20	Submucu septum resection	20	Antrostomy + Sepoplasty
21	Reposisi trauma nasi denganlocal anestesi	21	Adenotonsilektomi	21	Septoplasty	21	Blepharoplasty
22	Spooling Sinus	22	Antrostomi	22	Repair nares/ maxilla post trauma	22	Blepharoplasty inferior
23	Miringotomy Parasintese Telinga	23	Antrostomi sinus maksila	23	Tympanoplasty	23	Blepharoplasty superior
24	Ekstraksi serumen	24	Biopsi tumor cavum nasi	24	Eksterpasi kista duktus thyroplosus persisten	24	CWL
25	Cuci telinga	25	Biopsi tumor nasopharing	25	Eksterpasi tumor cavum nasi + Rhinotomi Lateral	25	CWL + Polipektomy
26	Tampon telinga	26	Biopsi tumor orofaring	26	Eksterpasi kista thyroglosus	26	FESS
27	Tes vestibulum kobrak	27	Biopsi tumor telinga	27	Kstraksi corpal eosophagus	27	Mastoidectomy + tympanoplasty
28	Audiometric	28	Bleparoplasty Atas/ Bawah	28	Ekstraksi corpal Orofaring	28	Rekontruksi Aurikula
29	Speech Audiometri	29	Eksplorasi	29	Ekstraksi polip hidung	29	Stapedectomy
30	Nasal toilet	30	Eksplorasi abses nasopharing	30	Faringeal Plap		
31	Beloq Tampon	31	Eksplorasi abses parafaring	31	Faringektomi		

32	Therapy Epistaksis	32	Eksplorasi cloth	32	Labioplasti Unilateral Besar/Bilateral	
33	Apusan tenggorok	33	Eksterpasi	33	Polipectomy	
34	Test alergi (prick test :tes temple, ekstrak makanan)	34	Eksterpasi corpal : cavum nasi	34	Polipectomy Cavum nasi	
		35	Eksterpasi kista preurikuler/brankial	35	Rekonstruksi Fiste Oroantral	
		36	Eksterpasi ranula	36	Rekonstruksi telinga tahap I/II/III	
		37	Eksterpasi besar	37	Turbinektomi	
		38	Eksterpasi kista brankial			
		39	Eksterpasi kista diktus tiroglosus			
		40	Ekstraksi korpal dalam			
		41	Incisi + Drainase abses Peritonsiler			
		42	Incisi + Drainase abses Preaurikuler			
		43	Incisi + Drainase Abses Retroaurikuler			
		44	Incisi + Drainase Abses septi/hematoma septi			
		45	Incise + Drainase abses Submandibula			
		46	Incisi + Drainase Pseudokista Aurikuler			
		47	Kuretase jaringan granulasi liang telinga			
		48	Rekonstruksi fraktur os nasal			
		49	Rekonstruksi hidung			
		50	Repair telinga			
		51	Reseksi septum		2	
		52	Septoplasty			
	,	53	Tonsilektomi			
		54	Tonsilektomi local			
		55	Tonsilektomi dan adenoidektomi			
		56	Trakeostomi			
		57	Trakeostomi (narkose)			
		58	Turbinectomy			
		59	Biopsi Endoskopintumor cavum nasi/nasopharing			

10. TINDAKAN MEDIS PARU 1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Sedang			Tindakan Besar		Tindakan Khusus			
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan			
1	SPIROMETRI	1	Biopsi Jarum	1	Pleurodesisi			
2	SPIROMETRI + Uji Bronkodilator	2	Pungsi Pleura	2	WSD			
3	Aff WSD			3	Biopsi transtorakal			

11. TINDAKAN MEDIS MATA

1. TINDAKAN NON OPERATIF

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar	Tindakan Khusus		
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	
1	Epilasi	1	Eksraksi corpus alineum non reaktif/ tanpakomplikasi	1	Ekstraksi corpus alineum reaktif dengankomplikasi	1	Injeksi Intra Okuler	
2	Massage saccus lacrimalis	2	Retraksi co oksalat	2	Irigasi trauma kimia dengan penyulit	2	Incisi hordeolum	
3	ganti kasa steril	3	Irigasi corpus alineum	3	Sondasi (probing saluran lakrimal)			
4	Angkat jahitan	4	Opthalmoscopy direct	4	Foto fundus			
5	Funduscopy	5	Streak retinanoscopy	5	Epilasi			
6	Ekstraksi corpus alineum sederhana	6	Irigasi trauma kimia tanpa komplikasi	6	Genioscopy 1(satu) mata			
7	Keratometri	7	Test regurgitasi	7	USG Mata			
8	Test buta warna	8	Test diagnostik strabismus	8	Perimetri			
9	Pemeriksaan visus	9	Anal test (satu) mata	9	Streak retinoskopy			
		10	Koreksi refraksi	10	Injeksiperi/retro bulbar			
		11	Tes fluorescine	11	Injeksi konjunctiva			
		12	Tonometri	12	Opthalmoscope indirect			
		13	Biometri					

2. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar	Tindakan Khusus		
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	
1	Biopsy adneksa	1	Aplikasi cryo	1	Ablatio	1	Ablation retina	
2	Cantororaphi, tarsoraphi, tarsotomi non estetis	2	Cyclo	2	Cataracta: decitio lentis, ekstarksi katarak, intrakapsultaris, ekstraksi katarak lainnya	2	Aplikasi sinar laser	
3	Chalasiion, hordeolum, pinguicula	3	Discisio cataracta secundaria	3	ECCE	3	Daccyro cysto rhinoscopy	
4	Eksterpasi kista mata	4	Ekstirpasi pterygium/ flap conjunctiva	4	ECCE + IOL	4	ECCE + Trabekulektomi	
5	Ekstirpasi granuloma	5	Ekstripasi tumor jinak conjunctiva/ palpebra	5	Ekstirpasi tumor ganas	5	Ekstirpasi katarak dengan pemasangan IOL	
6	Ekstraksi kalsium oksalat	6	Eviceratio	6	Ekstirpasi/ eksplorasi benda asing intraorbita. intraokuler	6	Ekstraksi mata + Rekonstruksi	

7	Ekstraksi korpus alienum externa tanpakomplikasi	7	Flap conjunctiva	7	Ekstraksi katarak intra/ ekstra kapsuler	7	Endolaser
8	Granuloma	8	Hecting kornea	8	Ekstraksi korpus sklerotomi, cylidialisasi, poeterior selerolectomi, dan sebagiannya	8	Faceomulsifikasi + IOL
9	Insisi khalazion tunggal tanpa komplikasi	9	Hecting sekunder	9	Enuklasi	9	Faceomulsifikasi + IOL + Trabekulektomi
10	Jahitan kecil konjunctiva/ palpebra	10	Indirectomi basal-perifersektoral	10	Enukleasi bulbi	10	Fakoemulsifikasi
11	Nevus	11	Insisi dan curretage khalazion multiple dengan penyulit	11	Eviscerasi	11	Insersi IOL
12	Operasi kornea	12	Iridektomi	12	Eviserasi	12	Insersi IOL + Operasi Glaukoma
13	Operasi pada kornea	13	Jahitan multiple conjunctiva/ palpebra denganukuran > 1 cm	13	Flap konjungtiva + symblepharektomi	13	Keratoplasty
14	Operasi palpebra (Abses, Tumor, Granuloma)	14	Operasi lain pada orbita dan bola mata (Penyuntikan alcohol Retrobulber)	14	Fokeomulsifikasi	14	Koreksi strabismus
15	Pengambilan corpal : konjungtiva	15	Operasi Tumor di kornea	15	Keratoplastik, ptosis plastic reconstruksi	15	Operasi Katarak
16	Pengambilan corpal : Kornea	16	Paracentase	16	Repair palpebra	16	Operasi katarak dengan FACO + IOL
17	Probing ductus nasilakrimalis	17	Parasentase	17	Semua jenis operasi glaucoma missal, trabeculectomi	17	Rekontruksi saluran lakrimal
18	Tatoage kornea	18	Pterygeum extirpase	18	SICS + IOL	18	Repair Retina
19	Wheeler, kista, tumor kecil jinak	19	Rekanalisasi rupture kanal	19	Strabismus correction	19	Viterectomy
		20	Repair kanalikulus dan punctie	20	Toilet luka trauma tembus bulbus okuli		
		21	Repair palpebra yang lain	21	Trabekulektomi		
		22	Repair pupil	22	Trabekulektomi/ iridektomi		
		23	Repair satu ekstensor tendon				
		24	Simblefarektomi				
		25	Tarsotomi/ trasoraphi				

12. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK PATOLOGI KLINIK

	KLINIK PATOLOGI KLINIK Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar	Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Haemoglobin	1	Darah Rutin/Darah Lengkap	1	ASTO	1	Analisa Sperma
2	Leukosit	2	SGOT	2	Rhematoid factor	2	Morfologi darah tepi
3	Trombosit	3	SGPT	3	HBS Ag EIA	3	ВМР
4	LED	4	LDH	4	Anti HBS EIA	4	analisa spinal/LP
5	Eritrosit	5	Total protein	5	HBS Ag ICT	5	Le Cell
6	Hb serial	6	Albumin	6	Anti HBS ICT	6	Analisa cairan pleura
7	Masa perdarahan/ BT	7	Globulin	7	ТЗ	7	Sel LE
8	Masa pembekuan/ CT	8	Ureum	8	T4	8	Analisa Cairan tubuh
9	Retraksi bekuan	9	Creatinin	9	TSH	9	Klutur (pus / urine / darah)
10	Reticulosit	10	Asam Urat	10	HIV /ANTI HIV EIA	10	Kultur Aerob
11	Eusinofil count	11	TTGO	11	HIV ICT	11	Kultur Anaerob
12	Sedimen urine	12	Natrium	12	Dengue Blot Ig G/M	12	Uji Sensivitas kuman
13	benzidin test	13	Kalium	13	Anti TB		
14	DDR	14	Kalsium	14	AGD		
15	Golda ABO 2 Rh+	15	Chlorida	15	INR		
16	Glukosa urine/ reduksi urine	16	Magnesium / Mg+	16	PTT		
17	Prot Bence Jones	17	Widal	17	APTT		
18	Esbach	18	VDRL / RPR	18	CRP		
19	Rivalta	19	Secret vagina / uretra	19	CRP titer		
		20	Filariasis	20	ТРНА		
		21	Tes kehamilan	21	Bilirubin total		
		22	Clerens creatinin	22	Bilirubin direk		
		23	Narkoba (1 jenis)	23	Bilirubin Indireck		
		24	SI	24	Fosfatase Alkali		
		25	TIBC	25	Gamma GT		
		26	Glukosa sewaktu	26	Kolesterol		
		27	Glukosa puasa	27	Kolesterol HDL		

2	28 C	Glukosa 2 Jam PP	28	Kolesterol LDL	
2	29 0	Glukosa Stick	29	Trigliserida	
3	30 U	Jrine Lengkap	30	CK-NaC	
3	31 F	Faeces Lengkap	31	СКМВ	
3	32 P	Pewarnaan BTA/Gram/Dipteri/Jamur/Spora	32	Darah samar	
3	33 N	Mantoux Test	33	Bilirubin Indireck	
			34	Troponin T	
			35	Troponin I	
			36	HbA1C	
			37	Total Lipid	
			38	Amylase	
			39	Anti HBc IgM EIA	
			40	Anti HBc Total EIA	
			41	Anti HCV / HCV EIA	
			42	Anti HCV ICT	
			43	TOXOPLASMA IgG	
			44	TOXOPLAMA IgM	
			45	Rubella IgG	
			46	Rubella IgM	
			47	CMV IgG	
			48	CMV IgM	
			49	HSV 1 IgG	
			50	HSV 1 IgM	
			51	HSV 2 IgG	
			52	HSV 2 IgM	
			53	Anti HAV Total EIA	
			54	Anti HAV IgM EIA	
			55	Salmonella (ICT)	
			56	T.Palidum (ICT)	

57 Malaria (ICT)
58 H.Pylori
59 FT4
60 LH
61 FSH
62 Prolactin
63 Progesteron
64 Estradiol
65 Testoteron
66 ß HCG (serum)
67 AFP
68 CEA
69 PSA
70 IgE Total
71 ANA test
72 D Dimer
73 Cross match/uji cocok serasi/uji silang

13. TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUTTINDAKAN OPERATIF

1	MULUTTINDAKAN OPERATIF Tindakan kecil Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan								
			Sedang		Besar		Khusus		
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan		
1	Removal suture from head and neck	1	Alveoloplasty (dengan komplikasi)	1	Closed reduction of temporomandibular dislocation	1	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi berat)		
2	Replacement of wound packing ordrain	2	Overculectomy (dengan komplikasi)	2	Other operations on oral cavity	2	Implantation of tooth		
3	Extraction of other tooth	3	Apicoectomy (dengan komplikasi)	3	Marsupialization of salivary gland cyst	3	Other manipulation of temporomandibular joint		
4	Alveoloplasty	4	Gingivoplasty (dengan komplikasi)	4	Other excision of salivary gland lesion	4	Palatoplasty		
5	Overculectomy	5	Extension or deepening of buccolabial or lingual sulcus	5	Other operations on salivary gland or duct	5	Plastic repair of mouth		
6	Apicoectomy	6	Open biopsy of tongue	6	Closed reduction of malar and zygomatic fracture	6	Excision of lesion of salivary gland (dengan komplikasi)		
7	Biopsy gum	7	Open biopsy of salivary gland or duct	7	Closed reduction of maxillary fracture	7	Excision or destruction of lesion or tissue of tongue (dengan komplikasi)		
8	Biopsy of alveolus	8	Lingual frenectomy (dengan komplikasi)	8	Closed reduction of mandibular fracture	8	Application of orthodontic appliance		
9	Other diagnostic of on teeth, gums, and alveolus	9	Labial frenectomy (dengan komplikasi)	9	Excision of lesion of salivary gland	9	Exicision of dental jaw (dengan komplikasi)		
10	Gingivoplasty	10	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi ringan)	10	Excision or destruction of lesion or tissue of Tongue	10	Local excision or destruction of lesion of facial bone		
11	Exicision of lesion or tissue of gum	11	Ecisi tumor complex	11	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi sedang)	11	Grafting tuylang rahang complex		
12	Suture laceration of gum	12	Fiksasi rahang reduksi terbuka>2 segmen	12	Drainage of face and floor of mouth	12	Koreksi anomaly dento fasial complex		
13	Other orthodontic operation (Removal of arch bars)	13	Fiksasi reduksi tertutup	13	Endoseous blade double	13	Mandibular staple bone late		
14	Suture of laceration of tongues	14	Grafting tulang rahang simple	14	Fiksasi rahang reduksi terbuka komplek	14	Osteotomy rahang dengan graft		
15	Diagnostic procedures on oral cavity	15	Koreksi anomaly dento fasial simple	15	Koreksi anomaly dento fasiel middle	15	Rekonstryksi palate vello faringeal		
16	Suture of laceration of lip	16	Labioplasty (komplit)	16	Grafting tulang rahang middle	16	Sinus graft+bio oss implant		
17	Suture of laceration of palate	17	Odontectomy posisi B	17	Labioplasti bilateral	17	Subperiosteal implant.		
18	Exposure of tooth	18	Oroantral fistula complex	18	Odontectomy posisi C				
19	Lingual frenectomy	19	Osteotomy rahang simple	19	Oroantral fistula CWL				
20	Labial frenectomy	20	Palatoplasty (simple)	20	Osteotomy rahang total/hemi				

21	Closure of salivary fistula	21	Squestrectomy sedang	21	Palate plasty
22	Exicision of dental jaw	22		22	Rekonstruksi preprostetic/estetica besar
23	Biocortical screw implant	23		23	Secuestectomy complex
24	Direct osteogenic bone pin/screw				
25	Etirpasi kista				
26	Endodontic stabilizer				
27	Fiksasi rahang reduksi terbuka simple				
28	Fiksasi rahang reduksi tertutup				
29	Frenectomy				
30	Labioplasty (komplit)				
31	Odontectomy posisi A				
32	Oroantral fistula simple				
33	Palatoplasty (tidak komplit)				
34	Replantasi/transplantasi/elemen				
35	Reseksi akar/buah				
36	Sialolitectomy				
37	Squrestrektomy sederhana				
38	Rekonstruksi preprostetik/estetika sedang-kecil				

14. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUTTINDAKAN OPERATIF

	Tindakan OPERATIF Tindakan kecil	Tindakan Sedang			Tindakan Besar	Tindakan Khusus		
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	
1	Tumpatan sementara biasa	1	Tumpatan GI besar	1	Reseksi akar gigi	1	Space retainer	
2	Tumpatan Gigi Kecil	2	Tumpatan komposit	2	Exo gigi dengan penyulit	2	Orthodontic fix per rahang	
3	Exo gigi sulung clorethyl	3	Perawatan saluran akar	3	Orthodontic remivable per rahang			
4	Exo gigi susu dengan suntikan	4	Pengisian + tumpatan permanent					
5	Dental examination	5	Exo gigi dengan penyulit ringan					
6	Scalling 1 (satu) rahang	6	Scalling 2 (dua) rahang					
7	Cetak 1 (satu) rahang	7	Cetak 2 (dua) rahang					
8	Fissure sealant	8	Tumpatan amalgam besar					
9	Occlusal grinding							
10	Tumpatan amalgam kecil							
11	Pulpa capping							
12	Other dental operation (other)							
13	Polishing tumpatan							
14	Control							

15. TINDAKAN MEDIS PROSTODONSI

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindaka n	No	Tindaka n	No	Tindaka n	No	Tindakan	
1	Akrilik Lepasan (1 gigi pertama atau rahang)	1	Crown / Bridge Akrilik / Gigi	1	Crown / Bridge Porselain / Gigi	1	Gigi palsu full rahang atas / bawah (Akrilik)	
2	Akrilik Lepasan (gigi selanjutnya)	2	Metal Frame / Rahang	2	Bridge Fiber Akrilik / Composite / Gigi			
3	Crown Sementara			3	Valvas / Gigi / Rahang			
4	Cetak RA dan RB			4	Obturator			
5	Kontrol Protese							

16. TINDAKAN MEDIS KULIT DAN KELAMIN 1. TINDAKAN NON OPERATIF

	Tindakan kecil	Tindakan Sedang			Tindakan Besar	Tindakan Khusus		
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tind akan	
1	Suntikan keloid, cyste acne	1	Ekstraksicomedo					
		2	Eksochleasi melia					
		3	Eksochleasi molluscum contagiosum					
		4	Tutul posophyllin condyloma					
		5	Tutul tcaa granulomapyogenicum					
		6	Tutul tcaa xanthelasma					
		7	Co2 snow hemangioma					

2. TINDAKAN OPERATIF

	Tindakan kecil Tindakan Sedang		Tindakan Besar			Tindakan Khusus			
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tind akan		
1	Incisi	1	Eksisi	1	Dermabrasi				
		2	Ekstirpasi naevus pigmentosus	2	Skin graft				
		3	Ekstirpasi naevus verucosus	3	Bedah listrik triepithelioma multiple				
		4	Ektupasi atherom cyst/ dermoid cyst	4	Bedah listrik verruca multiple				
		5	Bedah listrik veruca vulgaris simple	5	Bedah listrik skin tag multiple				
		6	Bedah listrik papilloma cutis/ skin tag/ seboikkeratosis simple						

17. TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAN MAKSOFASIAL

17.	TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAI	N MAP					
	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Biopsy of mouth	1	Drainage of face and floor of mouth	1	Wide exicision	1	Total / Hemimandibulectomy
2	Debridement	2	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi ringan)	2	Exicion of dental lesion of jaw (dengan komplikasi)	2	Total / Hemimaxilectomy
3	Extraction of decidous tooth	3	Exposure of tooth	3	Exicion of bone for bone graft	3	Other reconstruction of other facial bone
4	Extraction of other tooth	4	Closure nasal sinus fistula	4	Sialodenectomy	4	Bone Graft to facial bone
5	Incision	5	Closure of salivary fistula	5	Glossectomy	5	Genioplasty
6	Frenectomy	6	Marzupilization of salivary gland cyst	6	Removal of internal fixation	6	Temporomandibula arthroplasty joint
7	Gingivectomy	7	Alveolotomy	7	Sequestrectomy	7	Other manipulation of temporomandibular joint
8	Alveolectomy	8	Close reduction of malar and zygomatic Fracture	8	Exploration of maxilarry antrum with Caldwll-Luc aproach	8	Endosseuous dental implant
9	Extraction of other tooth	9	Close reduction of maxillary fracture	9	Labioplasty	9	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi berat)
10	Fistulectomy	10	Close reduction of mandible fracture	10	Palatoplasty	10	Insertion of synthetic implant on facial bone
11	Suture of laceration of gum	11	Other close reduction of facial fracture	11	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi sedang)	11	Mandibulectomy with sycronous reconstruction
12	Suture of laceration of lip	12	Exicion of dental lesion of jaw	12	Segmental mandibulectomy	12	Total ostectomy of other facial bone with synchronous reconstruction
13	Suture of laceration of tongue	13	Open reduction of temporomandibular dislocation	13	Segmental maxillectomy	13	Other reconstruction of mandible
14	Suture of laceration of other part of mouth	14	Open reduction of malar and zygomatic fracture	14	Inter dental wiring (IDW) & Inter maxilarry wiring (IMW)	14	Other renconstruction of other facial bone
		15	Open reduction of maxilary fracture	15	Open reduction of temporomandibular dislocation (dengan komplikasi)	15	Other reconstruction of other facial bone
		16	Open reduction of mandible fracture	16	Open reduction of malar and zygomatic fracture (dengan komplikasi)	16	Repair of tongue and plastic operation on tongue
		17	Other open reduction of facial fracture	17	Open reduction of maxillary fracture (dengan komplikasi)	17	Reconstruction palato vello faringeal
		18	Repair of cleft lip	18	Open reduction of mandible fracture (dengan komplikasi)	18	Other facial bone and orthognation surgery
		19	Correction of cleft palate	19	Other open reduction of facial fracture (dengan komplikasi)	19	Other orthognatic surgery on mandible
		20	Revision of cleft palate			20	Reconstruction of cleft lip osseus defect and deformities
						21	Reconstruction of cleft palate osseus defect and deformities

18. TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAN MAKSOFASIAL

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang	indakan Sedang Tindakan Besar			Tindakan Khusus		
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan		
1	UV (ultraviolet)		Pelayanan/tindakan dengan 2 (dua) modalitas fisioterapi sederhana		Paket Senam		Hydroterapi		
2	IRR (infra red radiation)		Taping/Straping		Pelayanan/tindakan lebih dari 2 (dua) modalitas fisioterapi sederhana		Pasien dengan kebutuhan khusus seperti : kasus Delay development, Cerebral palsy,Autisme		
3	Icing		Edukasi, sensory retraining		Pelayanan/tindakan dengan modalitas fisoterapi canggih dengan waktu singkat seperti: SWD (short wave diaterhermi), MWD (Microwave Diathermi), Traksi Cervicolumbal, Nebulizer, Interferential current, Musculeskeletal Strenght Duration Curve.		Tindakan fisioterapi khusus seperti Bobath,PNF, MLDV, Terapi Manipulasi		
4	Exercise sederhana		Latihan Artikulasi, suara, irama, latihan bahasa pada afasia		Exercise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium		Play therapy, latihan bicara padaapraxia verbal dan disfagia		
5					oral motor exercise, aoudio visual, deteksi dini				

19. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS/ FISIOTERAPI

1. PEMERIKSAAN NON KONTRAS

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Os Nasal	1	Abdomen	1	Abdomen 3 posisi	1	Multi Slice Scan
2	Mandibula	2	Thoraks	2	Tulang Vertebrae 4 posisi		
3	Mastoid	3	Kepala	3	Mammografi		
4	Waters	4	Ekstrimitas atas				
5	Clavicula	5	Ekstrimitas bawah				
6	Sholder Joint	6	Tulang Vertebrae				
		7	Panoramik				
		8	Cephalometri				

2. PEMERIKSAAN KONTRAS

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Apendicogram	1	BNO IVP	1	Colon inloop	1	Multi Slice Scan
2	Uretrografi	2	Oeshopagus Maag Duonedum (OMD)	2	Histerosalpingografi (HSG		
3	Cystografi	3	Barium Meal				
4	Fistulografi						

20. TINDAKAN MEDIS UROLOGI

1. TINDAKAN NON OPERATIF

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan		
1	Perawatan luka / GV/ WT	1	Aff Hecting 5-10	1	Businasi	1	PUNKSI Vesika urinaria		
2	Aspirasi Kista	2	Pasang Kateter	2	Aff Hecting >10				
3	Aff Chateter	3	Ganti Verban Luka Besar						
4	Injeksi								
5	Irigasi								
6	Perawatan Kateter								
7	Aff Hecting <5								

2. TINDAKAN OPERATIF

	Tindakan kecil	Tindakan Sedang		Tindakan Besar			Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	
1	Meatoplasty	1	Nefrostomy Perkutan	1	Pyelolithotomy	1	Uretheroplasty	
2	Sirkumsisi	2	Varycocelectomy Palomo	2	Nefrolithotomy	2	Eksplorasi Testis Mikro	
3	Businasi	3	Sistostomy Open	3	Pyeloplasty	3	Vasovasostomy	
4	Biopsi testis	4	Sectio Alta	4	Ureterolithotomy Proximal	4	TUR Prostat	
5	Eksisi Kurunkula	5	Sistoscopy	5	Nefrostomy Open	5	TUR Tumor Buli-buli	
6	Vasektomi	6	RPG	6	Varicocelectomy Mikro	6	Bladder Neck Incision	
7	Sisitotomi Perkutan	7	Pasang DJ-Sten Sin/Dextra	7	Open Prostatectomy	7	Limfadenectomy Retroperitonial	
8	Sistotomy	8	Orchidectomy Subkapsuler	8	Pasang DJ-Stent Bilateral	8	Limfadenectomy Illeoinguinal	
9	Meatotomi	9	Spermatocela	9	Enukleasi Kista Ginjal	9	Precutaneus Nephro Lithotripsi (PCNL)	
10	Sistoscopy	10	Open Renal Biopsi	10	Uretero Sigmoidoskcopy	10	Rekonstruksi Renovaskuler	
11	Biopsi Prostat	11	Ureterolysis	11	Uretherocutaneustomy	11	Ileal Condoit (Bricker)	
12	Sirkumsisi dengan pymosis	12	Ureterostomy	12	Ureterostomy	12	Nephroureterectomy	

13	Varicocele/Palomo	13	Orchidopexie	13	Uretheroplasty
14	Drainage Periureter	14	Operasi Peyronia	14	Horseshoe Kidney
15	Tosrio Testis	15	Pyeloplasty	15	Nephrostomy Percuta
16	Koreksi Priapismus	16	Ureterolithotomy	16	Divertikulectomy Vesika
17	Vasography	17	Ptelilithotomy	17	Ekstended Pyelolithektomy
18	Penektomy	18	Reseksi Parsial Vesica	18	Ureteroneo Sistotomy
19	Eksisi Chodee	19	Diverculectomy	19	Eksplorasi Testis Mikro Surgery
20	Vesicolithotomy (Sectio Altha)	20	Reseksi Urachus	20	Diseksi KGB Pelvis
		21	Rekonstruksi Vesika	21	URS
		22	Sitoplasty Reduksi	22	Radikal Nefrektomy
		23	Rekonstruksi Blassemeck	23	Radikal Prostatectomy
		24	Psoas Histch/Boari Flap	24	Radikal Sistektomy
		25	Reparasi Fistula Vasiko vaginal	25	Adrenalektomy Abdominotorakal
		26	Fistula Eterovesika	26	Epididimovasostomy
		27	ESWL	27	Repair Vesiko Vaginal Fistel Complex
				28	RPLND
				29	Longitudinal Nefrolithotomy (Kadet)
				30	Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika
				31	Nefrektomi Partial

21. TINDAKAN MEDIS OBSTETRI GYNEKOLOGI 1. TINDAKAN NON OPERATIF

	1. TINDAKAN NON OPERATIF		Ti- 1-1 Q- 1	Τ	Tindakan Besar	T	Tindakan Khusus
	Tindakan kecil	Tindakan Sedang					
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Ganti balut;	1	Pap Smear	1	Biopsi		
2	Vagina Swab;	2	Pasang Pesarium				
3	Aff heacting < 10	3	Pasang IUD				
4	Injeksi	4	Aff IUD dengan penyakit				
5	Imunisasi	5	Pasang Implant				
6	Suntik ICB	6	AF Implant				
7	Valua hygiene / vagina toilet	7	AF Implant dengan penyakit				
8	Aff IUD	8	Af Heacting > 10				
9	Ganti verband	9	Inspekulo				
10	Lavemen		,				
11	Tindik bayi						

2. TINDAKAN OPERATIF

	2. TINDAKAN OPERATIF Tindakan kecil		Tindakan Sedang	T	Tindakan Besar	Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Pungsi cavum Douglas	1	Curettage	1	Reparasi fistel dan Tuba	1	Histerektomi dengan penyulit
2	Insersi/Ekstraksi IUD,Norplant	2	Laparoscopy Diagnostic	2	Sectio Caesaria	2	Operasi tumor ganas ovarium
3	Pasang/Lepas KB Susuk	3	Jahit robekan fornix	3	Miomektomi	3	SC dengan penyulit
		4	Ekstirpasi Tumor Jinak Vagina	4	Salpingorectomi	4	RE SC (SC berulang)
		5	D/C Eksterpasi	5	Operasi Kehamilan ektopik terganggu (KET)	5	Section caesaria + sterilisasi pomeroy
		6	Biopsi serviks	6	Tumor Jinak Ovarium	6	Section caesaria dengan penyulit (gagal Vakum Ekstraksi, Perdarahan antepartum oleh karena placenta previa totalis dari plasenta letak rendah, rupture Uteri Iminen atau totalis)
		7	Insisi Kista Bartolin	7	Laparatomi translokasi IUD	7	Laparatomi translokasi IUD
		8	Ekstirpasi polip serviks	8	Reclosing/Reheacting Dehisensi	8	Reclosing/Reheacting Dehisensi
		9	Hysterescopy,Kolposcopy	9	Laparaskopi Operatif	9	Laparaskopi Operatif
		10	Cauter condiloma	10	Histerektomi	10	Histerektomi
		11	Manual Placenta	11	KET (kehamilan Ektopik Terganggu)	11	KET (kehamilan Ektopik Terganggu
		12	Ekstraksi IUD/Lepas susuk dengan penyulit	12	Miomektomi	12	Miomektomi
		13	Pasang laminaria/ induksi forniks	13	Sterilisasi	13	Sterilisasi
		14	Pungsi cavum dauglas	14	Salphingo-oophorektomi	14	Salphingo-oophorektomi
		15	D/C Kehamilan kurang dari 12 minggu	15	Mini laparatomi	15	Mini laparatomi
		16	Douglas pungsi	16	Repair fistel & tuba	16	Repair fistel & tuba
		17	Exterpasi polop/polipektomi	17	Kistektomi	17	Kistektomi
		18	Kauterisasi/cyro therapy	18	Laparatomi translokasi IUD	18	Laparatomi translokasi IUD
		19	Inseminasi	19	Kolpoperincoplasti/ kolpoperineorhapi kasus lama (> 3 bulan	19	Kolpoperincoplasti/ kolpoperineorhapi kasus lama (> 3 bulan
		20	Hidrotubasi	20	Hecting laserasi ddg vagina 2/3 proximal/fornix posterior		
		21	Hecting laserasi ddg vagina 1/3 distal	21	Hysteroscopy, kolposcopy		
		22	Perineorhapi	22	Jahitan obekan fornix		
		23	Sterilisasi Mini Laparotomy	23	Jahitan robekan serviks		
		24	Laparoskopi cincin falopy	24	Ekstirpasi tumor jinak vagina		
		25	Laparoscopy Percobaan	25	Ekstirpasi polip serviks		

26	Kuretase dengan penyulit (molla Hidatidosa, Missed Abortion, ada penyakit pemberat)	26	Cauter condiloma	
27	Extirpasi mioma, geburt, polip	27	Vacuum curreta molla	
28	Insisi Hymen	28	Kolpoperineorhapi	
29	Laparaskopi diagnostic	29	Hecting laserasi ddg vagina 2/3 proximal/fornix posterior	
30	Ekstirpasi mioma submukus bertangkai			
31	Marsupialisasi kista bartholin			
32	Repair hematoma vulva			
33	Ekstraksi IUD/lepas susuk dengan penyulit			

22. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	
1	ECG	1	USG Upper Abdomen	1	USG Tyroid	1	USG Doppler	
2	SPIROMETRI	2	USG Lower Abdomen	2	Diagnostk Tidur	2	USG Testis	
3	CTG	3	USG Trans Abdomen	3	FIBROSCAN	3	USG Prostat	
				4	Treadmill	4	USG Mammae	
				5	Skin Test Elektromedis	5	EEG	
				6	USG Trans Vaginal	6	Pemeriksaan Neurologis Lainnya	
						7	ECHO CARDIO GRAFI	

23. TINDAKAN MEDIK BEDAH SARAF 1. TINDAKAN NON OPERATIF

	Tindakan	Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
	kecil						
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Perawatan Luka Post op < 5 jahitan	1	Perawatan Luka Post op 5-10 jahitan	1	Perawatan Luka Infeksi diameter		
					5- 10 cm		
2	Injeksi (IC,IV, IM, SC)	2	Perawatan Luka Infeksi diameter <5	2	Perawatn Luka Post Op > 10		
			cm		jahitan		
3	Debridemet	3	Aff hecting 5-10 jahitan	3	Aff hecting > 10 jahitan		
4	Wound Toilet						
5	Aff Hecting < 3 jahitan						

2. TINDAKAN OPERATIF

2.	TINDAKAN OPERATIF		m: 1.1 O.1	Tindakan Pasar Tindakan			Tindakan Khusus	
	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar			
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	
		1	Eksterpasi Tumor Kista Jinak Kranium	1	Koreksi Impressi Fraktur Sederhana	1	Kraniotomy Neoplasma Desak	
		2	Extirpasi Tumor Exostose tulang	2	Pemutusan dan Eksisi Saraf(Neuroectomy/Neurolise)	2	Koreksi Likorhoe	
		3	Ventriculostomy Contaneus Ventricular Drainage	3	Pemasangan Fiksasi Interna	3	Penyakit vaskuler	
		4	Pemasangan Traksi Cervikal	4	Dekompressi Saraf Perifer Reseksi Ligan	4	Epidural/Subdural haematome	
		5	Pungsi Cairan Otak	5	Simple Functional Perfacet Denervasi	5	Neoplasma Basis Kranium	
		6	Biopsi saraf Cutaneus/Otot	6	Precutaneus Retro Gasserian (Rhizotomy/PRGR)	6	AVM/Aneuryama Operation	
		7	Blok saraf Perifer			7	Transpeonidal Approach	
						8	Kranioplasty	
						9	Koreksi Impressi Fraktur	
						10	Rekonstruksi Spinal/Spina Bipida	
	weeks the control of					11	Kranial Anterior/Posterior	
						12	Fusi Korpus Vertebra App. Anterior	
						13	Fusi Korpus Vertebra App.Posterior	
						14	Laminectomy Kompleks	
						15	Laminectomy Sederhana	
						16	Tumor Spinal daerah Kranio Cervikal	
						17	Tumor Spinal daerah Cervikal	
						18	Tumor Spinal daerah Toraco Lumbal	
						19	Neuroplasty Bedah Mikro PlexusBrachial	
						20	Neuroplasty Bedah Mikro Saraf Perifer	
						21	Neuroplasty Konvensional	
						22	Anastomosis Ventriculo Atrium	
						23	Anastomosis Ventriculo Peritoniun/VPShunt	
						24	Complicate Functie Neu Operation Steriotak	
0						25	Complicate Functie Neu Percutaneus Parav	
						26	Complicate Funtie Neu Precutaneus Kordot	

24. TINDAKAN MEDIK BEDAH ONKOLOGI

1. TINDAKAN NON OPERATIF

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Perawatan luka Post op < 5 jahitan	1	Pasang Kateter/ NGT	1	Perawatan Luka Post Op >15		
2	Aff Kateter/NGT	2	Kontrol Perdarahan	2	Perawatan Luka Post Op dengan resikoperdarahan		
		3	Perawatan Luka Post Op 5-10 jahitan	3	Perawatan luka kotor dengan resiko perdarahan		

2. TINDAKAN OPERATIF

	Z. TINDAKAN OPERATIF Tindakan kecil		Tindakan Sedang	Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Incisi Abses Mammae	1	Biopsi eksisional tumor mammae (single)	1	Biopsi eksisional tumor multiple	1	Radikal Mastektomi
2	Biopsi eksisional tumor kecil	2	Biopsi eksisional kelenjar getah bening	2	Isthmolobektomi	2	Breast konserving treatment
		3	Biopsi eksisional lipoma	3	Simple mastektomi	3	Total Tiroidektomi
		4	Biopsi incisional massa tumor	4	Subkutan mastektomi	4	Eksterpasi kista branchialis
		5	eksterpasi ranula	5	Eksterpasi mammae aberrant aksila	5	Disseksi leher radikal
		6	Eksterpasi /marsupilasi ganglion	6	Ekserpasi kista duktus tiroglosus persisten	6	Disseksi kelenjar getah bening aksila
				7	Eksterpasi kelenjar Liur Sub mandibula	7	Disseksi kelenjar getah bening Inguinal
				8	Eksterpasi kelenjar liur sub lingua	8	Disseksi Hygroma colli
						9	Superficial parotidektomy
						10	Total Parotidektomi
						11	Partial Glossektomi
						12	Total Golossektomi
						13	Hemi mandibulektomi
						14	Wide excition soft tissue tumor
						15	Eksisi luas kanker kulit + rekonstruksi

25. TINDAKAN MEDIK KESEHATAN JIWA 1. TINDAKAN NON OPERATIF

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	
1	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	1	Pelayanan menggunakan > 1 jenis alat tes < 2 jam	1	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa untkKasus perdata	1	Konseling	
2	Tes Psikometri dengan 1 alat ukur	2	Remedial teaching (Psiko terapi)	2	Terapi Keluarga (Psikoterapi Dewasa & Lansia)	2	MMPI (Psikologi Khusus) pada dewasadan anak	
3	wawancara psikiatri	3	Terapi Bermain (Psikoterapi Anak)	3	Terapi Kognitif dan Perilaku (Psikoterapi Dewasa dan Lansia)	3	Psikoterapi	
		4	Tes Psikometri > 1 alat ukur	4	Terapi Perilaku (Psikoterapi Anak)	4	Stress analisis	
		5	Pemberian obat injeksi					
		6	Terapu Kelompok (Psikoterapi dewasa dan Lansia)					

26. PATOLOGI ANATOMI

-	Tindakan kecil		Tindakan Sedang	Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Cytology Gynecology (Pap Smear)	1	Cytology Non Gynecology	1	Histopatology Specimen Kecil	1	Biopsi Jarum Halus
				2	Histopatology Specimen Sedang	2	Histopatology Spesimen Besar
						3	Potong Beku

27. TINDAKAN MEDIK JANTUNG

	Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	EKG	1		1		1	TREADMILL
						2	Echo Cardio Graphy

B. TINDAKAN OPERATIF

	Tindakan Kecil		Tindakan Sedang	Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Arteriografi	1	Kateterisasi Ka/Ki Tanpa Angio	1	Dilatasi katup Mitral	1	Angioplasty coroner (PTCA + Stent)
2	Kardiosintesa	2	Pemasangan Pacu Jantung Sementara	2	Pa Femoralis	2	Angioplasty coroner (PTCA + Stent)
3	Venografi			3	Pac Radialis		
				4	Pemasangan Pacu Jantung Menetap		

Pj. BUPATI PENAJAMPASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH JAM PASER UTARA

Hukum,

Tono, S.H.,M.H. 730117 200604 1 008

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	RUMAH TANGGA	
	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp. 5.100 /Bln
	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp. 7.100 /Bln
	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp. 10.100 /Bln
	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp. 17.000 /Bln
2	BISNIS	
	Bisnis Kecil (B-1)	Rp. 51.750 /Bln
	Bisnis Sedang (B-2)	Rp. 52.700 /Bln
	Bisnis Besar (B-3)	Rp. 79.100 /Bln
3	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA	
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Kecil	Rp. 52.300 /m ³
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Sedang	Rp. 52.700 /m ³
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Besar	Rp. 63.300 /m ³
4	INDUSTRI	
	Industri-1	Rp. 52.100 /m ³
	Industri-2	Rp. 52.700 /m ³
	Industri-3	Rp. 105.450 /m ³
5	UMUM	
	Umum-1	Rp. 31.600 /m ³
	Umum-2	Rp. 58.000 / m ³

B. TARIF RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	
1	Biaya Penyedotan Kakus	Rp. 250.000 / satu kali sedot	

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH ALEM PEKAJAN PASER UTARA Kelang Bagian Hukum,

7 30117 200604 1 008

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 **TENTANG** PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Sepeda motor	2.000/parkir/4 jam
2.	Mobil Penumpang/Sedan (taxi)/Pic Up	3.000/parkir/4 jam
3.	Bus sedang (tempat duduk diatas 28 orang)/Truck Sedang (JJB sampai dengan berat 8000 Kg)	4.000/parkir/4 jam
4.	Bus Besar (tempat duduk yang memiliki kapasitas di atas 28 orang)/Truck Besar (JJB diatas 8000kg)/ Kereta Gandengan/Kereta Tempel	8.000/parkir/4 jam

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH

HEATIEN PENAJAM PASER UTARA Kena Sanjan Hukum,

no, S.H.,M.H. NIP. 19730117 200604 1 008 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS RETRIBUSI /KELAS PASAR	JENIS / TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biaya Penempatan	Ruko/ Toko	400.000/m ²	Dipungut waktu penempatan
	(Semua Kelas Pasar)	Kios	200.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Kering	150.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Basah	100.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
2	Kelas 1	Ruko / Toko	3.000/ hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.500/hari atau 70.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman/Dadakan	10.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
3	Kelas 2	Ruko/Toko	3.000/hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman /Dadakan	7.500/hari atau /malam	Dipungut per hari
4	Kelas 3	Ruko/Toko	3.000/hari atau 80.000/malam	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan

NO.	JENIS RETRIBUSI /KELAS PASAR	JENIS / TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman /Dadakan	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
5	PKL	PKL/Rombong	3.000	Dipungut per hari
6	Pelataran Bongkar Muat Barang	a. Mobil 10 roda besar	15.000	Sekali Bongkar
		b. Mobil 6 roda besar	10.000	Sekali Bongkar
		c. Mobil 6 roda sedang	8.000	Sekali Bongkar
		d. Mobil 4 roda	5.000	Sekali Bongkar
7	Area Bermain	Lahan pelataran	5.000/m²/hari	Dipungut per hari

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABU ATIMIPENA M PASER UTARA LUKOPA BASIAN HUKUM,

> 7-P. Ono, S.H.,M.H. P. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

A. PEMAKAIAN PETAK SETIAP M ² PER HARI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1. Ruko (RumahToko)	0
2. Toko dan Kios	0
3. Rumah makan	0
4. Perancangan/penjualan daging	0
5. Los	0
6. Warung dan Jasa	0
7. Pelataran	0
B. LAPAK UNTUK BERJUALAN PER M ² DALAM	
SEHARI YANG DISEDIAKAN OLEH	
PEMERINTAH DAERAH	
1. Lapak 1 (musiman)	0
2. Lapak 2 (Depan toko dan trotoar jalan)	0
3. Lapak 3 (penjual sayur menggunakan jalan	0
lingkungan pasar)	
C. Limbah basah pasar per bulan	0
D. Limbah kering pasar per bulan	0
E. Pengaturan kendaraan roda dua di	0
lingkungan pasar grosir/pertokoan	
F. Bongkar muat barang	
1. Tonase kendaraan = 500 Kg	0
2. Tonase kendaraan> 500 s/d 1000	0
3. Tonase kendaraan> 1000 s/d 25000	0
4. Tonase kendaraan> 2500 s/d 5000	0
5. Tonase kendaraan> 5000 Kg	0
G. Kamar mandi/WC Sekalipakai	
Buang Air kecil	0
2. Buang air besar	0
3. Mandi	0
H. Tempat usaha dagang dan jasa yang	
menggunakan bangunan/tempat lapangan	
terbuka yang disediakan oleh pemerintah	
daerah untuk berjualan :	
1. UMKM	0
2. Promo Usaha Jasa	0
3. Promo Produk Industri	0

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya

HERETARIAT DAERAH

ANDARA PERANANAN PASER UTARA

HUKUM,

ANIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditempatkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelelangan	TARIF RETRIBUSI
1	Ikan dan Hasil Laut Lainnya.	4% dari Nilai Transaksi
2	Hewan/Ternak dan Unggas : a. Sapi, Kerbau dan Kuda b. Kambing/Domba c. Unggas	1% dari Nilai Transaksi 1% dari Nilai Transaksi 1% dari Nilai Transaksi
3	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan)	0.5% dari Nilai Transaksi
4	Hasil Hutan	1% dari Nilai Transaksi

- 1. Retribusi tempat pelelangan sebagaimana tersebut diatas, sebesar 4 % dari harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dengan pembeli dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pihak penjual sebesar 2 %
 - b. Pihak pembeli sebesar 2 %
- 2. RetribusiTempat Pelelangan pada angka 2 sampai 4 dibebankan pada pihak penjual.

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KEPSI DAGIAN PASER UTARA KEPSI DAGIAN HUKUM,

> Pito 16, S.H., M.H. 12730117 200604 1 008

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
a. R	Retribusi tempat khusus parkir di lokasi objek wisata	
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir
b. R	Retribusi tempat khusus parkir di pelataran parkir	1
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir
c. Re	tribusi tempat khusus parkir di taman parkir	1
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir
d. Re	etribusi tempat parkir khusus parkir di gedung parkir	
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	0/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	0/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	0/sekali parkir
e. Re	etribusi tempat khusus parkir insidentil	1
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir

Salinan sesuai dengan asliny SEKRETARIAT DAERAH N PENAJAM PASER U TAH

19730117 200604

AM PASER

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	JENIS KAMAR	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
Mes	s Pemerintah Daerah di Jakarta	
a.	Kamar Lantai Atas:	
	1. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	
	a) Kamar 1 dan Kamar 2	75.000/malam/orang
	Fasilitas:	
	- AC, TV, Telepon dan Kamar mandi didalam	
	b) Kamar 3 dan Kamar 4	50.000/malam/orang
	Fasilitas:	
	- AC, TV,dan Telepon	
	- Kamar mandi diluar	
	2. Umum	
	a) Kamar 1 dan Kamar 2	-
	Fasilitas:	
	- AC, TV, Telepon dan Kamar mandi di dalam	
	b) Kamar 3 dan Kamar 4	_
	Fasilitas:	
	- AC, TV dan Telepon	
	- Kamar mandi diluar	
b.	Kamar Lantai Bawah:	
	1. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	
	a) Kamar 1 dan Kamar 2	35.000/malam/orang
	Fasilitas:	
	- Tempat tidur 3/Tempat tidur 6	
	- AC,TV,dan Telepon	
	- Kamar mandi diluar	
	2. Umum	
	a) Kamar 1dan Kamar 2	-
	Fasilitas:	
	- Tempat tidur3/Tempat tidur 6	
	- AC,TV,dan Telepon	
	- Kamar mandi diluar	
	Taina mana anaa	
	*Tarif Mess hanya biaya sewa kamar.	

Pi. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KASHATEK PENAJAM PASER UTARA
KASHATEK PENAJAM PASER UTARA
KASHATEK PENAJAM PASER UTARA
KASHATEK PENAJAM PASER UTARA

PHANO, S.H., M.H. 19730117 200604 1 008 LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENISHEWAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	(Rp) 3
a.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	-
	1.sapi/kerbau/kuda	10.000 / ekor
	2.kambing/domba	3.000 / ekor
	3.unggas petelur	100 / ekor
	4.pedaging	100 / ekor
b.	Pemakaian Kandang	
	1.sapi/kerbau/kuda	8.000 / ekor
	2.kambing/domba	2.000 / ekor
	3.unggas	0 / ekor
c.	Pemakaian Kandang	
	1.sapi/kerbau/kuda	10.000 / ekor
	2.kambing/domba	2.000 / ekor
	3.unggas	50 /ekor
	4.pedaging	
d.	Pemeriksaan daging atau bahan asal hewan dari daerah lain dan daging impor yang tidak dilengkapi dokumen pemeriksaan	
	1.Daging	100 / kg
	2.Daging unggas	50 /ekor
e.	Kulit yang keluar dari Rumah Potong Hewan	
	1. sapi/kerbau/kuda	2.000 / lembar
	2. kambing/domba	1.000 / lembar

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH

JAM PASER UTARA

P. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Speed Boat/Kapal Motor

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
I.	Pelabuhan Speed Boat/Kapal Motor		
	Tanda Masuk Pelabuhan		
	- Harian	-	1.000,-/orang
	- Berlanggangan	-	20.000,-/orang/bulan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Penajam Buluminung

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Pelayanan Jasa Barang		
	a. Barang umum di terminal serbaguna (multipurpose terminal)		
	1) jasa dermaga:		
	a) barang umum	per ton/m³	0
	b) peti kemas	per box	0
	c) hewan	per ekor	0
	d) curah cair/ gas	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF	0
	e) curah kering	per ton/m³	0
	f) kendaraan	per unit/m³	0
	2) jasa stevedoring:		
	a) barang umum	per ton/m³ per pelayanan	0
	b) peti kemas	per box per pelayanan	0
	c) hewan	per ekor per pelayanan	0
	d) curah cair/ gas	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF per pelayanan	0
	e) curah kering	per ton/m³ per pelayanan	0
	f) kendaraan	per unit/m³ per pelayanan pelayanan	0
	3) jasa cargodoring:		
	a) barang umum	per ton/m³ per pelayanan	0

NO.	JE	NIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	b)	peti kemas	per box per pelayanan	0
	c)	hewan	per ekor per pelayanan	0
	d)	curah cair/ gas	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF per pelayanan	0
	e)	curah kering	per ton/m³ per pelayanan	0
	f)	kendaraan	per unit/m³ per pelayanan	0
		sa monitoring/ pervisi	per ton/m³/ unit/kegiatan per jam	0
		sa stripping/stuffing:	, § j	
	a)	barang pecah	per ton/m³ per pelayanan	0
	b)	curah kering	per ton/m³ per pelayanan	0
-	c)	hewan	per ekor per pelayanan	0
	d)	kendaraan	per unit/m³ per pelayanan	0
1 +	e)	peti kemas	per box per pelayanan	0
H			per box per perayanan	U
		sa receiving/delivery:	per ton /m³ per pelevene	0
-	a)	barang umum	per ton/m³ per pelayanan	
-	b)	peti kemas	per box per pelayanan	0
-	c)	hewan	per ekor per pelayanan	0
	d)	curah cair/ gas	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF	0
-			per pelayanan	0
-	e)	curah kering	per ton/m³ per pelayanan	0
	f)	kendaraan	per unit/m³ per pelayanan	0
		sa cleaning/	per ton/m³/kilo liter/unit	0
	tri	mming/sweeping	per pelayanan	
	8) pe	layanan tambahan:		
	a)	biaya administrasi nota	per nota	50.000
	b)	biaya inter terminal transfer	per ton/m³/box/unit	0
	c)	biaya stack awal	per ton/m³/box/unit	0
	d)	biaya administrasi IT system untuk e- payment	per nota	0
	e)	biaya <i>haulage</i>	per ton/m³/box/unit	0
	f)	biaya monitoring/ supervisi	per ton/m³/box/unit per kegiatan	0
	g)	biaya site office	per m²/box/unit	0
	b. Peti ke	emas di terminal peti s		
	1) op	erasi lapangan:		
		penumpukan	per ton/m³/box/unit per hari	0
	b)	lift on/lift off	per ton/m³/box/unit per pelayanan	0
	c)	gerakan ekstra	per ton/m³/box/unit per pelayanan	0

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	d) relokasi	per ton/m³/box/unit per pelayanan	0
	e) angsur	per ton/m³/box/unit per pelayanan	0
	operasi container freight station:		
	a) stripping/stuffing	per ton/m³/box/unit per pelayanan	0
	b) penumpukan	per ton/m³/box/unit per pelayanan	0
	c) penerimaan/ penyerahan	per ton/m³/box/unit per pelayanan	0
	a) pelayanan tambahan: a) biaya administrasi nota	per nota	50.000
	b) biaya inter terminal transfer	per ton/m³/box/unit	0
	c) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP)	per box	0
	d) biaya kartu ekspor	per box	0
	e) biaya <i>hi-co scan</i>	per ton/m³/box/unit	0
	f) biaya hi-co scan with behandle		0
	g) biaya <i>stack</i> awal	per ton/m³/box/unit	0
	h) biaya batal transaks		0
	i) biaya <i>after closing</i> time	per ton/m³/box/unit	0
	j) biaya administrasi IT system untuk e- payment	per nota	0
	k) biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP)	per ton/m³/box/unit	0
	c. Barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas		
	1) dermaga	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF	0
	2) penumpukan (tangki)	per kapasitas tangki/ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF per hari	0
	 plugging/unplugging (flexible hose) 	per kegiatan per kapal	0
	4) monitoring/ supervisi	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan	0
	5) pipa	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan per jam	0
	6) pemanas	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF	0

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
		per jam	
	7) pompa	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan per jam	0
	8) cleaning	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan	0
	9) trucking	per ton/m³/kilo liter/ MMBTU/MMSCF	20.000
	10) pelayanan tambahan:		
	a) biaya administrasi nota	per nota	50.000
	b) biaya administrasi IT system untuk e- payment	per nota	0
	c) biaya transfer	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF	0
	d) biaya monitoring/ supervisi	per ton/m³/kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan	0
-	d. Barang curah kering di terminal curah kering		
	1) dermaga	per ton/m³	0
	2) penumpukan (stock pile)	per ton/m³ per hari	
	a) batu bara	per terry in per man	15.000
	b) bahan bangunan		500
	c) hasil perkebunan dan pertanian		500
	d) kayu dan pipa baja		1.000
	3) conveyor/excavator/grab	per ton/m³	0
	4) plugging/unplugging	per kegiatan per pelayanan	0
	5) cleaning	per kegiatan	0
	6) trucking a.Batu Bara	per ton/m³	15.000
	b.Material Bangunan		500
	c.kayu dan pipa baja		1.000
	7) pelayanan tambahan: a) biaya administrasi nota	per nota	50.000
	b) biaya administrasi IT system untuk e- payment	per nota	0
	c) biaya transfer	per ton/m³	0
	e. Kendaraan di terminal kendaraan (<i>car terminal</i>)		
	1) dermaga	per ton/m³/unit	0

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	2) penumpukan	per ton/m³/unit per hari	0
	3) <i>flat bed on tire</i> / alat bantu mekanis	per unit	0
	4) stevedoring	per ton/m³/unit	0
	5) cleaning	per ton/m³ per kegiatan	0
	6) car wash	per unit	0
	7) repair	per ton/m³/unit	0
	8) glossing	per unit	0
	9) receiving/delivery	per ton/m³/unit	0
	10) pas	per unit	0
	11) painting	per unit	0
	12) tug master	per kegiatan	0
	13) labeling	per unit	0
	14) pelayanan tambahan:		
	a) biaya administrasi nota	per nota	50.000
	b) biaya administrasi IT system untuk e- payment	per nota	0
	f. Peti kemas di terminal daratan (<i>dry port</i>)		
	1) pergudangan	per ton/m³/box/unit/ kegiatan/hari	0
	2) penerimaan/penyerahan	per ton/m³/box/unit/ kegiatan	0
	3) pelayanan tambahan:		
	a) biaya administrasi nota	per nota	0
	b) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP)	per box	0
	c) biaya kartu ekspor	per box	0
	d) biaya hi-co scan	per ton/m³/box/unit	0
	e) biaya hi-co scan with behandle	per ton/m³/box/unit	0
	f) biaya stack awal	per ton/m³/box/unit	0
	g) biaya batal transaksi h) biaya administrasi IT system untuk e- payment	per ton/m³/box/unit per nota	0
2	Pelayanan Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan a. Tanda masuk (pas)		
	pelabuhan		
	1) orang (pengunjung, karyawan)	per orang/sekali masuk	2.000
	2) kendaraan roda 2	per unit/sekali masuk	3.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	3) kendaraan roda 4	per unit/sekali masuk	5.000
	4) kendaraan ≥ roda 6		
	a) truk tangki CPO	per unit/sekali masuk	10.000
	b) truk bak kayu dan besi	per unit/sekali masuk	10.000
	c) truk trailer	per unit/sekali masuk	12.500
	5) alat mekanik		
	a) crane	per unit/sekali masuk	100.000
	b) forklif	per unit/sekali masuk	75.000
	c) alat berat ban karet	per unit/sekali masuk	100.000
	d) alat berat ban rantai	per unit/sekali masuk	150.000
	b. Tanda masuk (pas) pelabuhan berlangganan		
	1) orang (karyawan)	per orang/bulan	50.000
	2) kendaraan roda 2	per unit/bulan	70.000
	3) kendaraan roda 4	per unit/bulan	120.000
	4) kendaraan ≥ roda 6		
	a) truk tangki CPO	per unit/bulan	225.000
	b) truk bak kayu dan besi	per unit/bulan	225.000
	c) truk trailer	per unit/bulan	300.000
	6) alat mekanik		
	a) crane	per unit/bulan	2.100.000
	b) forklif	per unit/bulan	1.575.000
	c) alat berat ban karet	per unit/bulan	2.100.000
	d) alat berat ban rantai	per unit/bulan	3.150.000
	c. Jasa air bersih	per ton/m³/kilo liter	0
	d. Distribusi listrik	per Kwh	0
	e. Pengisian air tawar	per ton/m³/kilo liter/unit	25.000
	f. Pengisian minyak	per ton/m³/kilo liter/unit	0
	g. Persewaan		
	 depo peti kemas 	per ton/m³/box/unit	0
		per kegiatan/hari	
	2) penampungan limbah	per ton/m³/kilo liter	0
		per kegiatan	
	3) perkantoran	per m²/tahun	0
	4) pergudangan	per ton/m³/box/unit per kegiatan/hari	0
	5) kios, warung, kantin	per m²/bulan	5.000
	6) periklanan	per m²/unit/kegiatan per bulan	0
	h. Penimbangan	per ton/m³	0
	i. Fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer	per box/unit per kegiatan	0
	j. Sampah limbah kapal	per ton/m³/rit/koli per kegiatan	0
	k. Pengemasan dan pelabelan	per unit	0
3	Retribusi pelayanan Pelabuhan	Penajam Buluminung	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	(Untuk Tol Laut) :		
	1.Pelayanan Jasa Barang		
	a. barang umum di terminal serb	aguna	
	1. jasa Dermaga a. curah kering (bahan kel tambahanpangan/ sanda kemasan	0 /T	
	b. curah basah/Gas LPG	0 /T	
	c. barang campuran	3	0 /T

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KANTATEN PENAJAM PASER UTARA Aepala Tan Hukum,

> (8), \$.H.,M.H. (117/200604 1 008

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Karcis masuk objek wisata :		
	a. Wisata anak-anak	Per orang	0
	b. Wisata dewasa	Per orang	0
2	Karcis Permainan Flying Fox :		
	a. Wisata anak-anak	Per orang	0
	b. Wisata dewasa	Per orang	0
3	Karcis permainan air :		
	a. Wisata Anak-anak	Per orang	0
	b. Wisata dewasa	Per orang	0
4	Penyewaan Tempat Rakan Tatau :	Per kegiatan	0
	a. Sewa pakaian adat :	Per Kegiatan	0
	b. Sewa auditorium/pendopo wisata:	Per hari	0
5	Tempat pemancingan:		
	a. Pemancingan ikan	Per orang	0
	b. Hasil Ikan pancingan	Per Kg	0
	c. Sewa alat pancingan	Per orang/hari	0
6	Karcis Bumper Car :		
	a. Dewasa	Per 10 menit	0
	b. Anak-Anak	Per 10 menit	0
7	Sewa Lapak Parkiran	per m ³ / bulan	0
8	Sewa Panggung dan Canopy Membrane	Per Event/Hari	0
9	Sewa Ruang Pertemuan/Pondopo	Per Event/hari	0
10	Sewa Kolam Pemancingan	Per hari	0
11	Karcis Mobil Wisata :		
	a. Dewasa	Per orang	0
	b. Anak-Anak	Per orang	0
12	Sewa Gerai Kuliner permanen	Per bulan	0
13	Sewa stand kuliner/booth	per hari	0
14	Sewa Gerai Souvenir	per bulan	0
15	Sewa Gazebo Kecil	Per 2 jam	0

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
16	Sewa Gazebo Besar	Per 2 jam	0
17	Karcis masuk kolam renang:		
	a. Dewasa	Per Orang	0
	b. Anak-Anak	Per Orang	0

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH

KRETARIAT DAERAH RNAJAM PASER UTARA Magin Hukum,

19730117 200604 1 008

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. CANGKOKAN / OKULASI

NO.	JENIS TANAMAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Rambutan	35.000	-
2	Kelengkeng	35.000	-
3	Sawo	40.000	-
4	Jeruk	25.000	_

II. BIBIT BATANG BAWAH

NO.	JENIS TANAMAN	UKURAN/TINGGI TNM	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Petai	< 30 cm	10.000	-
		> 30 cm	15.000	-
2	Alpukat	< 50 cm	15.000	-
		> 50 cm	20.000	-
3	Jambu Merah	< 40 cm	15.000	-
		> 40 cm	10.000	-
4	Nangka	< 50 cm	10.000	-
		> 50 cm	10.000	-
5	Kecapi	< 50 cm	15.000	-
		> 50 cm	10.000	-
6	Mentega	< 40 cm	15.000	-
		> 40 cm	10.000	-
7	Jambu Darsono	> 40 cm	15.000	-
		< 40 cm	10.000	-
8	Sirsak	> 30 cm	15.000	-
		< 30 cm	10.000	_
9	Durian	> 30 cm	15.000	-
		< 30 cm	10.000	-
10	Cempedak	> 50 cm	15.000	-
		< 50 cm	10.000	-
11	Lai	> 30 cm	15.000	-
		< 30 cm	10.000	-
12	Rambutan	< 50 cm	10.000	_
		> 50 cm	15.000	-

III. SUSUAN /SAMBUNGAN

NO.	JENIS TANAMAN	UKURAN/ TINGGI TNM	HARGA	KETERANGAN
1	Rambutan	> 40 cm	35.000	-
2	Lai	> 35 cm	35.000	-
3	Durian	> 35 cm	50.000	-
4	Nangkadak	> 35 cm	35.000	_
5	Cempedak	> 35 cm	35.000	-
6	Jambu Darsono	> 40 cm	35.000	-
7	Kelengkeng	> 35 cm	50.000	_

IV. PERKEBUNAN

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Kelapa Dalam		
	(1) BenihKelapa Dalam Tanpa Polibag	Pokok	0
	(2) Benih Kelapa Dalam Dalam Polibag	Pokok	0
	(3) Benih Kelapa Sawit Siap Tanam	Pokok	0
2	Benih Kelapa Sawit baby polibag	Pokok	0
3	Benih Karet Stum Mata Tidur	Batang	0
4	Benih KaretOkulasiSiapTanam	Pokok	0
5	Benih Lada Siap Tanam Dalam	Pokok	0
	Polibag	D	0
6	Stek Lada (5-7 ruas)	Batang	0
7	Benih Aren Siap Tanam	Pokok	0
8	Benih Kopi Robusta SiapTanam	Pokok	0
9	Benih Kakao SiapTanam	Pokok	0
10	BenihKelorsiaptanam	Pokok	0
11	AgenHayati		
	(1) Trichoderma sp (Cair)	Liter	0
	(2) Trichoderma sp (Padat)	Kg	0
12	KelapaSawit tandan buah segar (TBS)	Kg	0

V. PETERNAKAN

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Bibit Ternak		
	(1) Bibit Ayam Kampung	Ekor	0
	(2) Bibit Ayam Potong	Ekor	0
	(3) Bibit Ayam Petelur	Ekor	0
	(4) Bibit Sapi potong	Ekor	0
	(5) BibitSapiPerah	Ekor	0

VI. KEHUTANAN

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1	BibitUlin 30 sampai 50 Cm	Polibag	0
2	(2) Bibit Meranti 30 sampai 50 Cm	Polibag	0

VII. KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1. Ca	lon Induk dan Induk		
	a. Induk Ikan Mas		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	0
	Betina 0,3-3	Kg	0
	b. Induk Ikan Patin		
	Jantan 0,3-1,5	Kg	0
	Betina 0,3- 3	Kg	0
	c. Induk Ikan Nila		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	0
	Betina 0,3-3	Kg	0
	d. Induk Ikan Lele		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	0
	Betina 0,3-3	Kg	0
	e. Induk Ikan Puyu		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	0
	Betina 0,3-3	Kg	0
	f. Induk Ikan Gurami		
	Jantan 0,3- 1,5	Kg	0
	Betina 0,3-3	Ke	0
	g. Induk Ikan Biawan		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	0
	Betina 0,3- 3	Kg	0
	h. Induk Ikan Baong		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	0
	Betina 0,3-3	Kg	0
	i. Induk Ikan Jelawat		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	C
	Betina 0,3- 3	Kg	0
	j. Induk Ikan Lais	J	
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	C
	Betina 0,3 – 3	Kg	C
	k. IndukUdangGalah	8	
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	С
	Betina 0,3 – 3	Kg	C
	1. Kepiting	-6	
	Jantan 0,25 - 0,5	Kg	C
	Betina 0,3 - 3,0	Kg	O

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
	m. UdangWindu		
	Jantan 0,1- 0,2	Kg	0
	Betina 0,1 - 0,2	Kg	0
2 Ta	bel Calon IndukBenih Ikan Mas		
	a. benih ikan		
	Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	0
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	0
	Ukuran 3-5 cm	Per ekor	0
	Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	0
	b. benik ikan patin		
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	0
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	0
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	0
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	0
	c.Benih Ikan Nila		
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	0
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	0
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	0
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	0
	d. Benih Ikan Lele	1 CI CKOI	0
-	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	0
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	0
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	0
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	0
	e. Benih Ikan Puyu	T CT CKOT	
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	0
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	0
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	0
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	0
	f. Benih Ikan Gurami		
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	0
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	0
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	0
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	0
	g. Benih Ikan Biawan		
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	0
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	0
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	0
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	0
-	h. Benih Ikan Biawan	D 1	0
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	0
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	0
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	0
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	0
	i. Benih Ikan Jelawat		
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	0
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	0

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	0
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	0
	j. Benih Ikan Lais		
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	0
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	0
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	0
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	0
	k. BenihUdangGalah		
	Ukuran 1-2 cm	Per ekor	0
	Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	0
	i. BenurUdangWindu		
	Ukuran PL. 12	Per ekor	0
	Ukuran Pl. 15	Per ekor	0
	Ukuran PL. 30	Per ekor	0
	Gelondongan	Per ekor	0
	m. BibitKepiting		
	Ukuran 100 gr/ekor	Kg	0
	n. Bibit Rumput Laut	Kg	0

VIII. PARIWISATA

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Bibit Bunga	Per Botol	0
2	Bibit Anggrek Remaja	Per Pot	0
3	Bunga Anggrek	Per Pot	0

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Salinan sesuai dengan aslinya EKRETARIAT DAERAH

19730117 200604 1 008

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PEMAKAIAN PANGGUNG DAN ALAT MUSIK

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
	a.Luar Daerah	
	1.Panggung (ukuran12m x10m)	7.000.000/har
	2.Sound System	9.000.000/har
	3.Alat Musik	6.000.000/har
	4.Lighting	3.000.000/har
	5.Genset 100Kwh	2.000.000/har
	6.Genset 45Kwh	1.000.000/har
	b.Dalam Daerah	
	1.Panggung (ukuran12m x10m)	5.000.000/har
	2.Sound System	3.000.000/har
	3.Alat Musik	3.000.000/har
	4.Lighting	2.500.000/har
	5.Genset 100Kwh	1.000.000/har
	6.Genset 45Kwh	500.000/har
Vatan		500.00

Keterangan:

B. RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH, GEDUNG DAN STADION/LAPANGAN

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	RUMAH DINAS		
	Rumah Dinas Golongan III	35.000,-/bulan	-
II	GEDUNG DAN STADION/LAPANGAN		
1	Gedung Sepadu Penajam		
	a. Pemerintah Daerah	-	-
	b. Umum	500.000,-/hari	-
2	Gedung Sipakario Nipah-Nipah		
	- Event	1.000.000,-/hari	-
	- Kegiatan olahraga	200.000,-/bulan/ klub	-

^{* :} Nilai Sewa tidak termasuk transportasi, solar genset, operator sound dan operasional personil dan besaran nilai tersebut ditentukan oleh pengelola.

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
3	Gedung Serbaguna di Kelurahan		
	- Event	250.000,-/hari	-
	- Kegiatan olahraga	200.000,- /bulan/klub	-
4	Lapangan Gunung Seteleng		
	- Event Olahraga	0,-	-
	- Event Non Olahraga	1.000.000,-/event	-
	3		
5	Kantin Sekretariat Kabupaten	300.000,-/bulan	-
6	Gedung Graha Pemuda Pangeran Singa Negara		
	a. Gedung Aula Fasilitas: Listrik, Lampu, Area Parkir, Sofa + Meja Sofa, Kursi + sarung, Meja Rapat, Meja Bulat + Sarung, Kipas Angin Embun)		
	1) Pemakaian Komersial	5.000.000,-/Event	 (a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan di kenakan denda 10% dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	2) Pemakaian Harian Komersial	2.500.000,-/Hari	Pemakaian yang bersifat sedehana (Hanya menggunakan Kursi)
		7.000.000,-/Event (Malam)	 (a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan di kenakan denda 10% dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	3) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	4.500.000,-/ Event	 (a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) hari atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda 10% dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	4) Pemakaian Harian Sosial dan Keagamaan	2.000.000,-/Hari	Pemakaian yang bersifat sedehana (Hanya menggunakan Kursi)
		5.500.000,-/ Event (Malam)	 (a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan di kenakan denda 10% dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	5) Pemakaian Bidang Kepemudaan		
	a) Kegiatan	3.500.000,-/ Event	 (a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) har atau 3 x 24 jam, Sejal ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan di kenakan denda 10% dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dar 24 jam ditetapkan sebaga perjanjian baru.
	b) Pemakaian Harian Kegiatan Kepemudaan	1.500.000,-/Hari	Pemakaian yang bersifat sedehana (Hanya menggunakan Kursi)
	c) Latihan (Kegiatan Kepemudaan)	250.000,-/3 Jam	-
		500.000,-/ 3 Jam (Malam)	-
	6) Pemakaian Bidang pemerintahan	0,-	disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai
	b. Gedung I (Fasilitas: Ruangan, Area Parkir)	0,-	disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai
	c. Gedung 2 (Fasititas: Ruangan, Area Parkir)	0,-	disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai
	d. Area Parkir	1.000.000,-/ Hari	Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja
	e. Kursi Rapat	30.000,-/ PCS/Hari	-
	f. Meja Rapat	50.000,-/ PCS/Hari	-
	g. Meja Bulat + Sarung	50.000,-/ Set/Hari	-
	h. Kursi Chitos + Sarung	30.000,-/ Set/Hari	-
	i. Sofa + Meja	120.000,-/Set/Hari	-
	j. Kipas Angin Embun	350.000,- /Unit/Hari	-
7	Sport and Convention Center (Dome) Anden Oko		
	a. Area Olahraga (soft Matras) (Fasilitas: Area Olahraga Bermatras, Garis Lapangan Basket, Garis Lapangan Bulu Tangkis, Garis Lapangan Futsal, Gawang Futsal, Tiang Net Bulu tangkis, Ring Basket, Area Parkir)		
	1) Pemakaian Komersial,	6.000.000,-/ 6 Jam/Hari	Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton
	2) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	4.500.000,-/ 6 Jam/Hari	Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton
	Pemakaian Bidang Keolahragaan a. Kegiatan	3.500.000/6 Jam	Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton
	b. Latihan	550.000/2 Jam	
	4) Pemakaian Bidang pemerintahan	0	disertai alasan yang jelas dan datur dalam perjanjian pinjam pakai
	b. Ruangan Atlit dan Oficial	-	-
	c. Ring Basket 2 Set	500.000 PCS/Hari	-
	d. Tiang Net Badminton 6 Pcs	200.000 PCS/Hari	-
	e. Area Parkir	1.500.000/Hari	Khusus yang Menggunakan Tempa Parkir Saja

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	(Rp)	4
8	Stadion Olahraga Sepak Bola Panglima Sentik		
	 a. Stadion (Fasilitas Ruangan Oficial, Pemain, Ruang Tiket, Tribun Penonton, Runing Track, Lapangan Sepakbola, dan Area Parkir) 		
	1) Pemakaian Komersial,	4.500.000/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam), Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton
	2) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	4.000.000/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam), Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton
	3) Pemakaian Bidang Keolahragaan		
	a) Kegiatan	3.000.000/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton
	b) Latihan	500.000/ 1 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 1 jam)
	4) Pemakaian Bidang pemerintahan	-	disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai
	b. Ruangan Atlit dan Oficial	_	-
	c. Area Parkir	1.500.000/ Event	Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja
9	Lapangan Tenis (Fasilitas: Aula atlit, Ruang ganti, Toilet dan Lapangan Tennis)		
	1) Pemakaian Komersial	1.500.000/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).
	2) Pemakaian Bidang Keolahragaan	1.000.000/3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).
	3) Latihan Bidang Keolahragaan	150.000/1 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).
	4) Pemakaian Bidang pemerintahan	0	disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai
10	Boxing Arena		
	1) Pemakaian Kegiatan	2.500.000,-/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton.
	2) Latihan	500.000,-/3 Jam	Tambahan 25% dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam).
11	Mini Soccer		
	1) Pemakaian Kegiatan	2.500.000,-/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Latihan	300.000,-/1 Jam	Tambahan 25% dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam)
12	Lapangan Hockey Kabupaten Penajam Paser Utara		
,	1) Pemakaian Kegiatan	2.500.000,-/ 3 Jam	Tambahan 25%/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memunkinkan penggunaan tribun penonton
	2) Latihan	500.000,-/ 3 Jam	
13	Aula Masjid Al Ikhlas		
	1) Pemakaian Komersial	3.500.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		4.500.000,-/ Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)

C. PEMAKAIAN/PEMANFAATAN TANAH

NO	VENUC DEMANDA ATTA N	TARIF
NO.	JENIS PEMANFAATAN	RETRIBUSI
		(Rp)
1	2	3
1	Pemasangan Papan Reklame (Cover Zone)	15.000,-/meter/bulan
2	Usaha Komersil	5.000,-/meter/bulan
	a. Cluster Pemerintahan	5.000,-/meter/bulan
	b. Cluster Pertanian dan Perkebunan	50,-/meter/bulan
	c. Cluster Industri	15.000,-/meter/bulan
	d. Cluster Pemukiman	2.500,-/meter/bulan
3	Perdagangan Insidentil	3.000,-/meter/bulan

D. PENYEDIAAN JASA LABORATORIUM

NO.	JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1	Kadar Air		
	a. KD	Per Parameter Uji	60.000,-
	b. SPEEDY	Per Parameter Uji	135.000,-
2	Berat Jenis		
	a. BJ TANAH	Per Parameter Uji	80.000,-
	b. BJ agg halus	Per Parameter Uji	150.000,-
	c. BJ agg kasar	Per Parameter Uji	160.000,-
	d. BJ asphalt	Per Parameter Uji	200.000,-
3	Penyerapan	Per Parameter Uji	100.000,-
4	Atterberg Limit	Per Parameter Uji	150.000,-
5	Shrinkage Limit	Per Parameter Uji	200.000,-
6	Analisa Saring	Per Parameter Uji	160.000,-
7	Kadar Lumpur	Per Parameter Uji	160.000,-
8	Berat Isi	Per Parameter Uji	130.000,-
9	Soundness	Per Parameter Uji	250.000,-
10	Sand Equivalent	Per Parameter Uji	150.000,-

NO.	JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
11	Zat Organik	Per Parameter Uji	150.000,-
12	Abrasi Test	Per Parameter Uji	250.000,-
13	Impact Test	Per Parameter Uji	150.000,-
14	Kelekatan Terhadap Aspal	Per Parameter Uji	150.000,-
15	Pemadatan Dengan Cara Standar	Per Parameter Uji	200.000,-
16	Pemadatan Dengan Cara Modifield	Per Parameter Uji	300.000,-
17	CBR Laboratorium	Per Parameter Uji	275.000,-
18	Uji Hidrometer	Per Parameter Uji	100.000,-
19	Uncounfined Compresive Strenght (UCS)	Per Parameter Uji	150.000,
20	Konsolidasi	Per Parameter Uji	150.000,-
21	Kuat Geser Langsung (Direct Share)	Per Parameter Uji	150.000,-
22	Permeabilitas (Constant Head)	Per Parameter Uji	150.000,-
23	Permeabilitas (Filling Head)	Per Parameter Uji	150.000,-
24	Triaxial (UU)	Per Parameter Uji	375.000,-
25	Triaxial (CU)	Per Parameter Uji	550.000,-
26	Penetrasi	Per Parameter Uji	100.000,-
27	Titik Lembek	Per Parameter Uji	100.000,-
28	Daktilitas	Per Parameter Uji	100.000,-
29	Kelarutan Dalam CHCI3	Per Parameter Uji	125.000,-
30	Kehilangan Berat	Per Parameter Uji	125.000,-
31	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Parameter Uji	125.000,-
32	Titik Nyala	Per Parameter Uji	125.000,-
33	Berat Jenis Semen	Per Parameter Uji	125.000,-
34	Konsistensi Semen	Per Parameter Uji	75.000,-
35	Pengikatan Awal Semen	Per Parameter Uji	100.000,-
36	Kehalusan Semen	Per Parameter Uji	100.000,-
37	Ekstraksi Reflux	Per Parameter Uji	200.000,-
38	Ekstraksi Sentrifugal	Per Parameter Uji	200.000,-
39	Kuat Tekan Beton (Kubus)	Per Benda Uji	60.000,
40	Kuat Tekan Beton (Silinder)	Per Benda Uji	80.000,-
41	Kuat Tekan Mortar	Per Benda Uji	60.000,
В	Pemeriksaan Lapangan	Ter Benda Oji	00.000,
1	Pemboran Tangan	Per Meter	100.000,-
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Per Contoh	125.000,-
3	Pengambilan Contoh Dengan SPT	Per Contoh	125.000,-
4	Pemboran Mesin Tanah Basah	Per Meter	150.000,-
5	Penyondiran Ringan	Per Titik	900.000,-
		Per Titik	
6 7	CBR Lapangan Sand Cone	Per Titik Per Titik	180.000,-
		Per Titik Per Titik	150.000,-
8	Dynamic Cone Penetrometer (DCP) Velenduton (Renkelmean Ream)	Per Titik Per Titik	150.000,
9	Kelendutan (Benkelmean Beam) Core Drill	Per Titik Per Titik	180.000,-
			200.000,
11	Kuat Tekan Dengan Alat Hammer Test	Per Titik	100.000,-
	Keterangan: *UNTUK PENGUJIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN	N TRANSPORTASI DITANGG	UNG OLEH
	REKANAN PEMOHON		
С	Pembuatan Rancangan Campuran		
1	Campuran Beton	Per Contoh Uji	800.000,-
2	Campuran Aspal	Per Contoh Uji	1.350.000,-

NO.	JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
3	Campuran Agregat	Per Contoh Uji	600.000
4	Urugan Tanah (Pilihan, Biasa)	Per Contoh Uji	600.000
5	Campuran Mortar	Per Contoh Uji	400.000
6	Soil Cement	Per Prosentase Campuran	800.000
7	Sampel Tabung	Per Contoh Uji	500.000

E. BIAYA JASA

NO.	JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Kuat Tekan Lentur	Perbenda uji	250.000
2	Uji Tarik Besi	Perbenda uji	1.200.000

F. BIAYA LAINNYA

NO.	PELAYANAN UMUM LAINNYA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	Biaya Bubut	150.000
2	Biaya Teknisi Luar Kota	750.000
3	Biaya Pembantu Teknisi Luar Kota	450.000
4	Biaya Teknisi Dalam Kota	400.000
5	Biaya Pembantu Teknisi dalam Kota	200.000

G. PENYEDIAAN JASA ALAT BERAT

NO.	JENIS ALAT	MERK/TYPE	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Wheelloader	Caterpillar	-	-
2	Excavator On Wheel	Caterpillar 320D	0,9M3	-
3	MotorGrader	Caterpillar120 Hand 135H	3,5M3	-
4	VibrationRoller	Caterpillar CS/SP-533E	8 Ton	-
5	Buldozer	Caterpillar D6	6 M3	-
6	BechoLoader	Holand	-	-
7	Trailler	Nissan Diesel CWB45A	18 Ton	-
8	Dump Truck	Izusu 120	3,5 Ton	-

H. FASILITASI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	JENIS ALAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Videotron		
	a. 1 jam/120 Kali tayang	35.000.000	bulan/sisi
	b. 3,5 Jam/ 420 Kali tayang	50.000.000	bulan/sisi
	c. 15 Jam/1800 Kali Tayang	210.000.000	bulan/sisi
2	Papan Reklame/Billboard	150.000	hari/sisi
		4.500.000	bulan/sisi
		49.500.000	tahun/sisi
		Rp.200.000	jam
3	Tower Triangle	Rp.800.000	bulan/Perangkat
		Rp.8.800.000	tahun/Perangkat

I. RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
1.	Makanan, Semen, Air Minum		
	a. Sampai dengan 1kg	40	Perbuah
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	75	Perbuah
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	120	Perbuah
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	150	Perbuah
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	750	Perbuah
	f. Lebih dari 100 kg	1.500	Perbuah
2.	Minuman		
	a. Sampai dengan 1L	40	Perbuah
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5L	75	Perbuah
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20L	150	Perbuah
	d. Lebih dari 20 L	300	Perbuah
3.	Selain Makanan dan Minuman		
	a. Sampai dengan 1kg	150	Perbuah
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	375	Perbuah
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	450	Perbuah
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	600	Perbuah
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	1.200	Perbuah
	f. Lebih dari 100 kg	1.500	Perbuah

.500

MAKMUR MARBUN

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

FAST 200604 1 008

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. KOEFISIEN/INDEKS PERHITUNGAN

(1) Indeks Terintegrasi (It) meliputi:

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksita s	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepe (Fm)	milikan	a.Negara	0
Ganda/Campuran	0,6			b.Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500m ² Dan <2 lantai					
b.Luas <500m ² Dan >2 lantai	0,8				

(2) Indeks Lokalitas (Ilo) meliputi:

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Usaha non UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen);
- 2. Usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
- 3. Hunian sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen);
- 4. Bangunan fungsi sosial sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
- 5. Bangunan fungsi campuran sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).

(3) Koefisien Jumlah Lantai:

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1(n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau

lapis basemen pada bangunan gedung.

- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum(\text{LLixKL})) + \sum(\text{LBixKB}))}{(\sum\text{Lli} + \sum\text{LBI})}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL: Koefisien jumlah lantaiLBi: Luas Basemen ke-iKBi: Koefisien Jumlah lapis

(4) Indeks Bangunan Gedung (Ibg) Terbangun Meliputi:

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

- (5) Indeks prasarana bangunan gedung (I) untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.
- (6) Indeks prasarana bangunan (I) gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, dan bangunangedung fungsi keagamaan ditetapkan sebesar 0,00.
- (7) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1,75%.

B. SHST DAN Hspbg

(1) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Struktur standar harga satuan tertinggi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga (Rp)			
1.	Harga Satuan Gedung Negara					
	- Gedung Tidak Sederhana	m^2	6.790.000			
	- Gedung Sederhana	m^2	5.620.000			
2.	Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara					
	- Rumah Tipe A	m ²	6.530.000			
	- Rumah Tipe B	m^2	6.440.000			
	- Rumah Tipe C,D,E	m^2	5.170.000			
3.						
	- Pagar Gedung Negara					
	Pagar Depan	M	3.380.000			
	Pagar Belakang	M	2.310.000			
	Pagar Samping	M	2.190.000			
	- Pagar Rumah Negara					
	Pagar Depan	M	3.200.000			
	Pagar Belakang	M	1.470.000			
	Pagar Samping	М	1.390.000			

(2) Adapun ketentuan perhitungan luas lantai bangunan gedung adalah:

- a. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- c. Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- d. Luas bagian bangunan gedung seperti seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- e. Lua s*overstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

(3) Struktur dan harga satuan RetribusiP rasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

			HARGA	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
NO.	JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	SATUAN	SATUAN RETRIBUSI	Pem-	RUSAK BERAT / PEKERJAAN	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN
			(HS _{pbg}) (Rp)	bangunan Baru	KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
a.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	m	1.000	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
b.	Tanggul /retaining wall	m	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
c.	Turap batas kaveling/persil	m	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
d.	Konstruksi penanda masuk lokasi - Gapura (luas maksimum 2 m²) - Selebihnya dihitung	unit m²	50.000 5.000	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
e.	Gerbang	m^2	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
f.	Konstruksi perkerasan - terbuka komersil dengan perkerasan - terbuka komersil tanpa perkerasan - terbukanon komersil - Jalan - Lapangan Upacara - Lapangan olahraga terbuka	m ² m ² m ² m ² m ²	25.000 500 0 0 0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
g.	Konstruksi perkerasan aspal	m^2	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
h.	Konstruksi perkerasan glassblock	m²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
i.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m^2	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
j.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)	m^2	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

	JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	SATUAN	HARGA	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
NO.			SATUAN RETRIBUSI (HS _{pbg}) (Rp)	Pem- bangunan Baru	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
k.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	m ²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
1.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah Kolam renang	m ²	10.000	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50%= 0,225
		m ²	-			
m.	Konstruksi instalasi/gardu -gardu listrik, ruang travodan paneldengan luas maksimum 10m ² -Selebihnya dihitung	unit m²	1.000.000	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
	- Instalasi Telepon/komunikasi - Instalasi Pngolahan	unit unit	0			
n.	Konstruksi penghubung -Jembatan Beton -Jembatan Kayu - Boxculvert * Ukuran 1m x 1m * Ukuran 2m x 2m * Ukuran 3m x 3m -Gorong-gorong *diameter 70-100cm ²	m² m² unit unit unit unit	600.000 150.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
ο.	Konstruksi menara	m	200.000	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
p.	Konstruksi Menara reservoir	Per 5 m ²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
q.	Konstruksi Menara cerobong	Per 5 m ²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
r.	Konstruksi monument	unit	1.000.000	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
s.	Tugu	unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
t.	Patung	unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
u.	Di dalam persil	unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
v.	Di luar persil.	unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
w.	Konstruksi septic tank, sumur resapan	unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

	JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	SATUAN	HARGA	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
NO.			SATUAN RETRIBUSI (HS _{pbg}) (Rp)	Pem- bangunan Baru	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
X.	Konstruksi reklame/papan nama - Billboard papan iklan - Papan nama	unit unit	0 0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
y.	Konstruksi reklame/papan nama - Reklame (Papan Iklan/Billboard) Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	m ²	21.000	1,00	0,65 x 50%=0,325	0,45 x 50%=0,225
Z.	Fondasi mesin	Unit mesin	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
aa.	Konstruksi menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan)	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
ab.	Konstruksi antena radio Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki; Ketinggian 25-50 m Ketinggian 51-75 m Ketinggian 76-100 m Ketinggian 101-125 m Ketinggian 126-150 m Ketinggian diatas150 m		0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
ac.	Konstruksi antena radio Sistem guy wire/bentang kawat; Ketinggian 25-50 m Ketinggian 51-75 m Ketinggian 76-100 m Ketinggian 101-125 m Ketinggian 126-150 m Ketinggian diatas150 m		0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

	JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	SATUAN	HARGA	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
NO.			SATUAN RETRIBUSI (HS _{pbg}) (Rp)	Pem- bangunan Baru	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
ad.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara bersama; Ketinggian kurang dari 25 m Ketinggian diatas 50 m	Unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
ae.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara mandiri; Ketinggian kurang dari 25 m Ketinggian diatas 50 m	Unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
af.	Tangki tanam bahan bakar	Unit	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
ag.	Pekerjaan drainase (dalam persil) - Saluran - Kolam tampung	m m²	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
ah.	Kontruksi penyimpanan/silo	m³	0	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dinyatakan per satuan volume prasarana.

Salinan sesuai dengan aslinya

TAPATE TRENA JAM PASER UTARA

ag an Hukum,

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN